

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PEKANBARU (STUDY KASUS SMPNEGERI KECAMATAN TAMPAN)



OLEH :

ZIKARMAN
NIM. 10975006941

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI KOTA PEKANBARU (STUDY
KASUS SMP NEGERI KECAMATAN TAMPAN)
OLEH:
Zikarman

Kebijakan Dana BOS di latarbelakangi oleh kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunya daya beli masyarakat yang berdampak negatif terhadap akses masyarakat dalam pendidikan dasar sembilan tahun sesuai UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.” dalam penggunaan, pengelolaan dan mengimplementasi kebijakan Dana BOS ini dikelola oleh sekolah secara mandiri dan harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan dan akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Besaran Dana BOS yang didapatkan oleh sekolah berdasarkan jumlah murid disekolah tersebut.

Penelitian implementasi kebijakan Dana BOS dilakukan pada SMP Negeri Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berlangsung pada bulan november 2012 hingga selesai, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh SMP Negeri Kota pekanbaru khususnya SMP Negeri Kecamatan Tampan. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah orang tua siswa/wali murid dan tim manajemen BOS sekolah. Teknik pengambilan data yang digunakan dengan menyebarkan angket, wawancara dan studi lapangan/observasi. Sedangkan sumber data adalah data primer dan data skunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan) sudah berjalan dengan Baik, dengan persentase 81,77%. Walaupun dari hasil tabulasi angket dan wawancara mengungkapkan Baik, namun dari hasil observasi/tinjauan dilapangan penulis melihat, implementasi kebijakan Dana BOS dalam prakteknya masih terdapatnya kelemahan-kelemahaan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan, penggunaan dan pengelolaan Dana BOS oleh sekolah. Seperti masih dominanya pihak sekolah dalam penyusunan RAPBS dan wali murid hanya dijadikan sebagai formalitas saja, masih lemahnya fungsi komite sekolah sebagai Tim Manajemen BOS disekolah, kurangnya pemahaman wali murid terhadap penggunaan dan pemanfaatan Dana BOS, disebabkan transparansi yang dilaksanakan oleh sekolah masih belum optimal untuk melakukan transparan/keterbukaan kepada wali murid serta lemahnya pengawasan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh wali murid maupun masyarakat.

Keyword :penggunaan dan Implementasi Dana BOS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1. Implementasi Kebijakan	16
2.1.1 Pengertian Implementasi	16
2.1.2 Pengertian Kebijakn	18
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	21
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	26
2.2. Dana Bantuan Operasional Sekolah	31
2.2.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah	32
2.2.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah	32
2.2.3 Sasaran Program BOS dan Besaran Bantuan	33

2.2.4 Larangan Penggunaan BOS.....	33
2.3. Pandangan Syariat Agama Islam Tentang Kebijakan.....	34
2.4. Defenisi Konsep.....	40
2.5. Konsep Operasional.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Waktu dan Tempat.....	43
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	43
3.4. Populasi dan Sampel.....	44
3.4.1 Populasi	44
3.4.2 Sampel.....	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6. Analisa Data.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	50
4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan	50
4.1.1 Administrasi Pemerintahan.....	58
4.1.2 Mata Pencarian Penduduk di Wilayah Kecamatan Tampan	59
4.1.3 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.....	59
4.2. Organisasi Pelaksana Program BOS.....	61
4.3. Mekanisme dan Pelaksanaan BOS	64
4.3.1 Mekanisme Alokasi Dana BOS.....	64
4.3.2 Mekanisme Penyaluran Dana BOS	65

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
5.1. Identitas Responden.....	69
5.2. Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru.....	70
5.2.1 Hasil Tinjauan Lapangan / Observasi	71
5.2.2 Tanggapan Responden	73
BAB VI PENUTUP	114
6.1. Kesimpulan	114
6.2. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAPHY PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Sekolah dan besaran Dana BOS Kota Pekanbaru	6
Tabel I.2	Daftar SMP Negeri Kota Pekanbaru.....	8
Tabel I.3	Jumlah Siswa dan Bantuan Dana BOS Pada SMP Negeri Kecamatan Tampan Tahun 2012	10
Tabel III.1	Penentuan Populasi dan Sampel	47
Tabel IV.1	Mata Pencarian Kecamatan Tamapan.....	59
Tabel IV.2	Tingkat Pendidikan	59
Tabel IV.3	Sarana Ibadah Kecamatan Tampan.....	60
Tabel IV.4	Sarana Kesehatan	60
Tabel V.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jeneis Kelamin...	69
Tabel V.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Umur	69
Tabel V.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
Tabel V.4	Tanggapan Responden Terhadap Pihak Sekolah Melakukan Musawarah Dengan Wali Murid Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Sekolah.....	74
Tabel V.5	Tanggapan Responden Terhadap Penyusunan Anggaran Adanya Tujuan untuk Penggunaan Dana BOS.....	75
Tabel V.6	Tanggapan Responden Trehadap Adanya Kesepakatan Pengelolaan Dana BOS disekolah Dengan Wali Murid	76
Tabel V.7	Tanggapan Responden Terhadap Perencanaan, Pelaporan Penggunaan Dana BOS Kepada Wali Murid.....	77
Tabel V.8	Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Dana BOS Dengan Petunjuk Teknis BOS	78
Tabel V.9	Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Dana BOS Sesuai Dengan Hasil Rapat.....	79
Tabel V.10	Tanggapan Responden Terhadap Dibebaskanya Semua Biaya Sekolah.....	80

Tabel V.11	Tanggapan Responden Terhadap Aktifnya Pengawasan Dari Wali Murid.....	81
Tabel V.12	Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Wali Murid Dalam Penggunaan Dana BOS	82
Tabel V.13	Tanggapan Responden Terhadap Penyampaian Laporan Penggunaan Dana BOS Oleh Sekolah	83
Tabel V.14	Tanggapan Responden Terhadap Keaktifan Wali Murid Dalam Menghadiri Laporan Penggunaan Dana BOS.....	84
Tabel V.15	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tertib Administrasi.....	85
Tabel V.16	Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya Informasi Penggunaan Dana BOS.....	89
Tabel V.17	Tanggapan Responden Terhadap Mudahnnya Wali Murid Mendapatkan Informasi	90
Tabel V.18	Tanggapan Responden Terhadap Papan/spanduk Informasi Dana BOS	91
Tabel V.19	Tanggapan Responden Terhadap Mengetahui Pengelolaan Dana BOS Oleh Wali Murid.....	92
Tabel V.20	Tanggapan Responden Terhadap Sekolah Memberikan Kemudahan Akses Informasi Penggunaan Dana BOS	93
Tabel V.21	Tanggapan Responden Terhadap Sekolah Menggumumkan Penggunaan Dana BOS.....	94
Tabel V.22	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Transparan	95
Tabel V.23	Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Dana BOS Sesuai Dengan Target	99
Tabel V.24	Tanggapan Responden Terhadap Adanya Sasaran Penggunaan Dana BOS Oleh Sekolah.....	100
Tabel V.25	Tanggapan Responden Terhadap Kelengkapan Administrasi Oleh Sekolah Penggunaan Dana BOS	100
Tabel V.26	Tanggapan Responden Terhadap adanya Penilaian Dari Wali Murid Pelaksanaan Dana BOS	101

Tabel V.27	Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Dana BOS Mempunyai Ukuran Oleh Sekolah	102
Tabel V.28	Tanggapan Responden Terhadap Dana BOS Yang Dikelola Sekolah Berjalan Sesuai Rencana	103
Tabel V.29	Tanggapan Responden Terhadap Pembukuan Penggunaan Dana BOS	104
Tabel V.30	Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya Dokumentasi Penggunaan Dana BOS	105
Tabel V.31	Tanggapan Responden Terhadap Adanya Sekolah Menyebarluaskan Penggunaan Dana BOS	106
Tabel V.32	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Akuntabilitas	107
Tabel V.33	Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri	110

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia memadai merupakan jembatan bagi suatu bangsa untuk meningkatkan daya saing secara global dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada suatu bangsa, maka diperlukan perhatian yang besar untuk dapat memberikan akses yang memadai bagi tiap-tiap warga Negara dalam proses peningkatan mutu sumber daya manusia.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan manusia suatu bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh sektor kesehatan untuk mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu Negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1), diamanatkan pada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam

mengenyam pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal tersebut hanya dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat. Dalam undang-undang dasar 1945 memberikan penjelasan bahwa pendidikan merupakan hak yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya pada golongan masyarakat ekonomi yang kuat saja tetapi juga pada golongan ekonomi masyarakat yang lemah.

Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif dan berakhlak mulia. Komitmen yang kuat dari pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah dibutuhkan agar visi pendidikan nasional dapat diwujudkan. Guna menyokong terwujudnya visi tersebut, maka Pendidikan Nasional melalui Kementerian Pendidikan Nasional memiliki misi yang harus dilaksanakan sebaik mungkin guna menyokong terwujudnya visi tersebut, maka pendidikan nasional melalui kementerian pendidikan nasional memiliki misi yang harus dilaksanakan sebaik mungkin yaitu;

1. Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar
2. Mewujudkan pendidikan Nasional yang merata dan bermutu
3. Mewujudkan system pendidikan efektif, efesien dan bertanggung jawab

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi warga Negarayang juga tertuang dalam undang-undang dasar pasal 33 yang kemudian dijabarkan dengan lebih kongret pada undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan serta memberikan tekanan yang kuat pada

pengambilan kebijakan untuk memberikan prioritas yang lebih pada terselenggaranya pendidikan untuk setiap warga negara.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi pendidikan Nasional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah perbaikan terhadap tingkat pendidikan, kualitas pendidikan yang belum memenuhi standar mutu pendidikan, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara terpisah, namun harus secara menyeluruh dan berkesinambungan. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut khususnya dalam hal alokasi anggaran sektor pendidikan dengan tujuan dan harapan dapat menunjang jalannya visi dan misi pendidikan Nasional.

Salah satu implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian tujuan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan bermutu adalah dengan melakukan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sumber kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Dengan adanya kebijakan yang dilakukan kepada pendidikan Nasional yang melalui program kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

tidak secara langsung mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan terkait dengan masalah pembiayaan pendidikan serta pemerataan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat baik kalangan masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu. Bentuk- bentuk penyelewengan atas dana alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) justru membuat tujuan utama dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang memperingankan beban untuk pihak sekolah maupun siswa dalam rangka mengsucceskan wajib belajar sembilan (9) tahun bermutu sulit untuk tercapai secara maksimal.

Kebijakan Dana bantuan operasional sekolah dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa kenaikan BBM yang mengakibatkan turunya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar (wajibdikdas) sembilan tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, pasal 5, Ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Dan pasal 11 Ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Dalam konteks ini, pada prinsipnya kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah

diharapkan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola kebijakan, baik cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban Dana BOS yang telah diterima oleh sekolah.

Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu;

1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran Dana BOS dari arus Kas umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan Dana BOS di Daerah dan mekanisme penyaluran dari Kas Daerah ke Sekolah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian Dana BOS dan penggunaan Dana BOS di Sekolah.

Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan pemerintah memberikan dampak positif terhadap pendidikan di Indonesia. karena dari kebijakan pemerintah semua daerah yang ada di Indonesia mendapatkan Dana Bantuan operasional sekolah yang telah diterapkan diberbagai Kabupaten dan Kota diseluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. pelaksanaan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Pekanbaru sudah dimulai sejak bulan Juli Tahun 2006. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan. Jumlah sekolah yang mendapatkan Dana BOS sebanyak 349 sekolah dari 355 sekolah

yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun jumlahsekolah yang mendapatkan atau menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat pada tabel 1-1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Sekolah dan Besaran Mendapatkan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah sekolah		Total Siswa SD	Total Siswa SMP	Dana Bos SD	Dana Bos SMP	Alokasi Dana BOS Kota Pekanbaru
		SD	SMP					
1	2008	237	81	98.297	36.306	9829601703	5218914888	15.148516.591
2	2009	240	84	91.225	37.138	9122408775	5338513224	14.455921.999
3	2010	252	89	103.789	37.237	14.28045000	5707063700	83.800870.000
4	2011	254	90	104.900	37.580	14.49075000	5390065900	85.800750.000
5	2012	256	93	106.830	37.775	15.49035000	6705062500	88.781650.000

Sumber Data; Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2012

Bantuan Operasional Sekolah di salurkan melalui rekening sekolah yang kemudian dikelola oleh sekolah. Jumlah dana yang diberikan pada sekolah dihitung sesuai dengan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. Tujuan dari adanya Program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa terutama untuk siswa tidak mampu serta meringankan biaya operasional sekolah. Program BOS merupakan penunjang bagi penuntasan program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. BOS dianggap perlu untuk dikaji karena pada dasarnya subsidi merupakan kebijakan di mana masyarakat berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat kurang mampu adalah target utama dari kebijakan Dana BOS. Mengacu pada hal tersebut tentunya BOS

sebagai salah satu bentuk subsidi pada sektor pendidikan perlu dikaji, sebab penetapan jumlah dana yang diberikan kepada sekolah hanya berdasarkan jumlah murid saja. Siswa mampu dan siswa yang tidak mampu memperoleh peluang yang sama dalam mendapatkan manfaat dari BOS sebagai salah satu bentuk subsidi pendidikan. Sekolah harus mampu mengimplementasikan Dana BOS tersebut dengan tepat agar dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa hambatan serta untuk meringankan biaya operasional sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk melihat penerima manfaat BOS bagi siswa mampu dan kurang mampu serta untuk membantu biaya operasional, dijabarkan menjadi tiga tujuan khusus sebagai berikut (panduan BOS, 2011) :

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Adanya program Bantuan Operasional Sekolah tidak secara langsung mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan terkait dengan masalah pembiayaan pendidikan serta pemerataan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat baik kalangan masyarakat mampu maupun tidak mampu.

Di mana setiap sekolah pada tingkat SMP mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 710.000,-/Siswa/Tahun. Untuk mengetahui Sekolah Menengah Pratama (SMP) yang menerima Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1-2 di bawah ini;

Tabel 1.2
Daftar Sekolah Menengah Pratama (SMP) yang
Mendapatkan Dana Bos di Kota Pekanbaru Tahun 2011–2012

No	Nama SMP Kota Pekanbaru yang menerima Dana BOS	Alamat lengkap sekolah
1	SMP Negeri 1 Pekanbaru	Jl. Sultan Syarif Kasim
2	SMP Negeri 2 Pekanbaru	Jl. Prof. M, Yamin SH. No 65
3	SMP Negeri 3 Pekanbaru	Jl. Dahlia No. 102
4	SMP Negeri 4 Pekanbaru	Jl. Dr. Sutomo
5	SMP Negeri 5 Pekanbaru	Jl. Sultan Syarif Kasim
6	SMP Negeri 6 Pekanbaru	Jl. Rumbai Km 2,5 Tipe VI
7	SMP Negeri 7 Pekanbaru	Jl. Lokomotif No. 28
8	SMP Negeri 8 Pekanbaru	Jl. Adi Sucipto No. 115
9	SMP Negeri 9 Pekanbaru	Jl. Imam Munandar No. 398
10	SMP Negeri 10 Pekanbaru	Jl. Dr. Sutomo No. 108
11	SMP Negeri 11 Pekanbaru	Jl. Bambu Kuning No. 28
12	SMP Negeri 12 Pekanbaru	Jl. H. Guru Sulaiman
13	SMP Negeri 13 Pekanbaru	Jl. Renggowarsito I No. 15
14	SMP Negeri 14 Pekanbaru	Jl. Hangtuah No. 43
15	SMP Negeri 15 Pekanbaru	Jl. Lembah Sari
16	SMP Negeri 16 Pekanbaru	Jl. Cempaka
17	SMP Negeri 17 Pekanbaru	Jl. Pembangunan

18	SMP Negeri 18 Pekanbaru	Jl. Lily No. 95
19	SMP Negeri 19 Pekanbaru	Jl. Yos Sudarso
20	SMP Negeri 20 Pekanbaru	Jl. Abadi No. 9
21	SMP Negeri 21 Pekanbaru	Jl. Sukarno Hatta
22	SMP Negeri 22 Pekanbaru	Jl. Sidodadi No. 32
23	SMP Negeri 23 Pekanbaru	Jl. Garuda Sakti
24	SMP Negeri 24 Pekanbaru	Jl. Sri Amanah Palas
25	SMP Negeri 25 Pekanbaru	Jl. Kartama
26	SMP Negeri 26 Pekanbaru	Jl. Hangtuah Gg kenanga
27	SMP Negeri 27 Pekanbaru	Jl. Nelayan N0.221
28	SMP Negeri 28 Pekanbaru	Jl. Utama-Okura-Rumbai Pesisir
29	SMP Negeri 29 Pekanbaru	Jl. Tegal Sari Rumbai
30	SMP Negeri 30 Pekanbaru	Jl. Kelly Raya Perumnas Rumbai
31	SMP Negeri 31 Pekanbaru	Jl. Becah Basung
32	SMP Negeri 32 Pekanbaru	Jl. Balam
33	SMP Negeri 33 Pekanbaru	Jl. Sidorukum Ujung/Arengka Dua
34	SMP Negeri 34 Pekanbaru	Jl. Kartama No. 68
35	SMP Negeri 35 Pekanbaru	Jl. T. Bey/Reformasi 2
36	SMP Negeri 36 Pekanbaru	Jl. Repilita I
37	SMPLB Pembina	Jl. Segar
38	SMPLB Peran Mulia	Jl. Hr. Soebrantas

Sumber Data; Dinas Pendidikan Prov. Riau 2012

Dari tabel di atas terlihat seluruh sekolah SMP Negeri yang ada di Kota Pekanbaru Mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari

pemerintah. Dana BOS yang seharusnya secara konsep digunakan untuk dapat membebaskan pungutan biaya sekolah serta mengeratiskan biaya sekolah bagi siswa, terutama bagi siswa miskin yang terdapat di sekolah pada kenyataannya belum dapat diimplementasikan oleh sekolah secara keseluruhan untuk pengelolaan Dana BOS dengan tepat yang dikelola oleh sekolah dalam biaya pendidikan dalam sekolah tersebut. Dari berbagai media massa disebutkan banyak terjadi penyelewengan perihal pemanfaatan dana yang telah dialokasikan, hal tersebut mengakibatkan penyaluran dana BOS belum sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa temuan yang muncul di media massa Kelaemahaan dari Implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah Dalam prakteknya pihak kepala sekolah dan komite sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan, penggunaan Dana BOS yang tidak transparan yang dikelola oleh pihak sekolah dan dalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Bantuan Operasional pihak Sekolah masih sering melakukan manipulasi sehingga akuntabilitas dan kredibilitas masih diragukan. Dalam penggunaan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana BOS dalam aturannya yang berlaku, seperti biaya kegiatan kepala sekolah. (**Error! Hyperlink reference not valid.**, di akses Minggu, 01 Januari 2012)

Di Kecamatan Tampan terdapat dua buah SMP Negeri yaitu SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 23 yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional

Sekolah. Adapun jumlah siswa dan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang didapatkan oleh sekolah ini dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel I.3
Jumlah siswa dan Dana Bantuan Opeasional Sekolah Pada SMP
Negeri 20 dan SMP Negeri 23 Kecamatan Tampan Tahun 2012

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Alokasi Dana BOS
1	SMP Negeri 20 Pekanbaru	1034	Rp. 185.842.500
2	SMP Negeri 23 Pekanbaru	919	Rp. 169.512.500

Sumber Data; Dinas Pendidikan Prov. Riau 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa SMP Negeri yang ada di Kecamatan Tampan telah mendapatkan dana BOS yang harus dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Dana BOS oleh sekolah. Pada kenyataannya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kecamatan Tampan masih kurangnya tranparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah dan lemahnya pengawasan yang dilakukan masyarakat serta Wali Murid kepada sekolah SMPN Kecamatan Tampan dalam mengelola dana BOS di sekolah. Sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam melakukan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam peraturan dan ketentuan dari pemerintah tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah harus melibatkan Orang Tua Siswa sejak perencanaan hingga pelaporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pada kenyataannya Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dilapangnya masih terdapat permasalahan di sekolah Menengah Pratama Negeri (SMPN) Kecamatan Tampan. Dari hasil wawancara penulis dengan orang tua siswadan pegawai dinas Pendidikan Provinsi Riau dilapangan pada tanggal 10 bulan Oktober 2012menunjukan bahwa praktek dilapangan Dana BOS masih belum sesuai dengan harapan, adapun permasalahan yang masih terjadi pada SMPN Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah;

1. Masih adanya siswa miskin yang tidak masuk dalam cakupanlayanan BOS, sebagian siswa miskin tersebut masih dikenakan biayapendidikan dalam proses belajar mengajar. Seperti biaya komputer, ekstra krikuler dan lain-lainnya
2. Pada beberapa sekolah dana BOS digunakan dan diperuntukandengan prosentase yang cukup besar untuk pembayaran guru tidaktetap yang seharusnya bisa melalui anggaran Pemerintah Daerah ataulokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernahmelakukan musyawarah dengan orang tua atau wali murid termasukdalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid atauwali murid diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikanbantuan kekuarangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan olehsekolah.
4. Ketidak pedulian orang tua siswa dalam pengawasan dana BOS yangdi kelola oleh sekolah yang bersangkutan, dalam beberapa kasus orangtua

siswa tidak memahami bentuk Bantuan Operasional Sekolah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orangtua siswa.

Padahal keberadaan kebijakan Dana BOS seharusnya adanya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah. Karena Dana BOS dapat untuk membebaskan ataupun peringanan biaya operasional sekolah tentunya mutlak perlu dinikmati oleh para pelajar tanpa hambatan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 60 Tahun 2011, mengatakan *“setiap sekolah yang mendapatkan Dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dibenarkan memungut biaya kepada Siswa.”* Akan tetapi praktek dilapangan pelaksanaan Dana BOS belum dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat pentingnya pendidikan yang berkualitas dan manfaat Dana BOS.. Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai;

“Analisis Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pratama Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus Sekolah Menengah Pratama Negeri Kecamatan Tampan) ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan seputar Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang telah diuraikan Pada Latar Belakang Masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai ***“Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah***

Pertama Negeri (SMPN) Kota Pekanbaru (Study Kasus SMPN Kecamatan Tampan)”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakanya penelitaian ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Yang merupakan salah satu bentuk kebijakan. Informasi yang didapat digunakan untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Yang hasilnya digunakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang serjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Jadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah ***“Untuk mengetahuiimplementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kota Pekanbaru khususnya pada SMPNegeri Kecamatan Tampan.”***

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan Ilmu Penulis dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama buat Jurusan Administrasi Negara.
2. Untuk menambah daftar bacaan pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dapat digunakan oleh penelitian lain sebagai masukan dengan penelitian sejenis.

4. Agar penelitian yang berikutnya yang sejenis untuk dapat melakukan pengkajian ulang tentang penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisikan landasan teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian berisikan tentang jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Pada bab ini akan menjelaskan kondisi geografis, sejarah singkat terbentuknya Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan, gambaran

umum wilayah dan tim pelaksana Dana BOS serta mekanisme penyaluran Dana BOS yang penulis teliti.

BAB V HASIL PENELITIAN.

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP.

Dimana bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Dana BOS pada SMP Negeri Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakanyang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus *Webster* merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (Menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2005; 64)

Carl Friedrich mengatakan implementasi adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan(kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu(Bambang Sunggono 1994:137).

Berdasarkan uraian diatas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat terutama pada bidang pendidikan. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga Negeranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebastier dalam Wahab, 2004:68).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut uraian di atas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *“policy”*. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal

apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3).

Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam membuat suatu kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam melaksanakan praktik dilapangannya. Apabila kebijakan bertentangan dengan prakteknya, maka kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye dalam subarsono(2005;2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Dari penjelasan yang diungkapkan oleh Thomas Dye dapat di gambarkan, seperti ketika pemerintah mengetahui bahwa banyak Anak-anak di Indonesia putus sekolah maka pemerintah membuat suatu kebijakan atau sama sekali tidak membuat kebijakan untuk mengatasi masalah pendidikan, berarti pemerintah sudah mengambil suatu kebijakan.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (publik policy) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing defenisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar balakang yang berbeda-beda.

James E. Anderson dalam subarsono (2005;2) medefenisikan kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintahan. Berdasarkan pengertian dari James E. Anderson berarti

kebijakan itu dibuat oleh suatu badan pemerintahan atau aparat yang ada pada pemerintahan, yang berbeda pada bidang-bidang tertentu seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia pada bidang pendidikan tentang kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah untuk membantu sekolah maupun masyarakat dalam masalah pendidikan.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Dalam melakukan implementasi kebijakan terdapat beberapa aktor yang bekerja sama untuk menjalankan implementasi kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan adanya administrasi hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah ini terdapat beberapa actor dan organisasi dalam melakukan teknik yang bekerja sama mengimplementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Implementasi Kebijakan merupakan kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Eugene Bardach dalam Agustino, Leo (2008;138) Implementasi kebijakan Yaitu;

“Adalah cakupan untuk membuat suatu program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas, tetapi lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Bahwa implementasi kebijakan suatu cakupan pemerintah untuk membuat suatu program yang kelihatannya bagus diatas kertas. Seperti kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang di programkan oleh pemerintah yang kelihatannya bagus diatas kertas tetapi dalam melakukan implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah dimana kedengaraanya mengenakan ditelingan masyarakattetapi lebih sulit untuk mengimplementasikannya untuk memuaskan masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan pemerintah tersebut.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino,Leo (2008;139) mendefenisikan Implementasi kebijakan sebagai;

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai, akan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”

Implementasi kebijakan diatas dapat di simpulkan dalam membuat suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berbentuk dalam undang-undang dan perintah-perintah serta keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang lalu lembaga eksekutif membuat suatu peraturan melalui menteri pendidikan dan kebudayaan secara jelas dan

sasaran kebijakan yang ingin mencapai tujuan yang diinginkan bersama dalam mengimplementasikan kebijakan pada bidang pendidikan nasional

Sedangkan Van Mater dan Van Horn mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai;

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr, dalam Agustino, Leo (2008;139) dimana meraka katakan bahwa :

“Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir(output) yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.”

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Marrele crindle dalam winarno (2005;102) mengatakan implementasi kebijakan :

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

Bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses struktur kebijakan. Karena melalui implementasi kebijakan ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat di pengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hal ini juga dipertegas oleh

Chief. J.o.Udijo dalam sujianto (2008;140) dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah :

“Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.”

Bahwa dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pemerintah. Karena diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan tersebut.

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut dapat diketahui bahwa dalam Implementasi kebijakan terdapat menyangkut hal-hak yaitu :

1. Adanya tujuan.
2. Adanya sasaran.
3. Adanya aktifitas/kegiatan pencapaian tujuan.
4. Adanya hasil dari kebijakan tersebut.

Jadi implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Berarti Pemerintah telah membuat suatu tindakan implementasi Kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan. Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158).

Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus diimplementasikan, dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah bisa melalui bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan. Dalam membuat suatu kebijakan belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagal suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan melibatkan usaha dari Policy Makers untuk mempengaruhi apa yang dikemukakan oleh Lipsky “*Street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk melakukan implementasi kebijakan dibutuhkan aktor untuk menjalankan suatu kebijakan. Seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam melakukan usaha implementasi kebijakan akan melibatkan institusi, seperti birokrasi Provinsi, Kabupaten/kota dan pihak sekolah yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79).

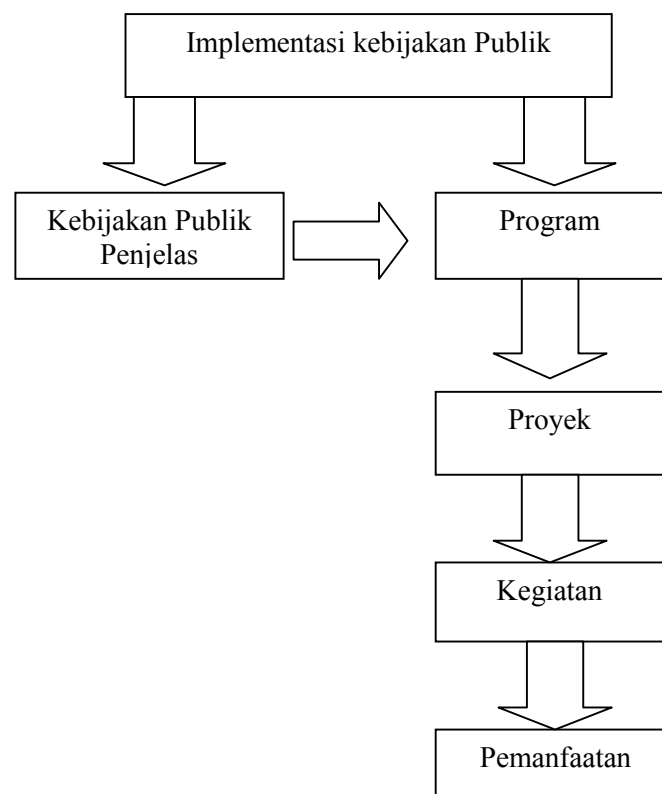
Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: *Pertama* ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. *Kedua*, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. *Ketiga*, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan atau instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7). *Keempat*, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77).

Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasiantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pulasebaliknya.*Kelima*, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo,bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma,dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horndalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dantanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan atau instansi pelaksana kebijakan harus merasa memilikiterhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkansebelumnya.*Keenam*, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakanmenurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh manalingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telahditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik(Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial danpolitik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho 2004;158) untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu; dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppres, inpres, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Gambar Struktur Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber: Nugroho, Riant. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi.

Selanjutnya Syukur dalam surmayadi (2005;79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses Implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan (Implementasi) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Untuk mencapai keberhasilan kebijakan publik, ada beberapa indikator penentunya. Sebagaimana yang dikatakan Winter dalam Nugroho (2009;233) ada empat kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Proses formasi kebijakan
2. Prilaku organisasi pelaku implementasi kebijakan
3. Prilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah(street-level-buraucrats)
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Grindle dalam Sujianto (2008;31) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Yaitu menyangkut masalah konflik keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi Menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua faktor yakni, isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Sementara itu

menurut Laster dalam Sujianto (2008;32) mengemukakan implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses hasil dan sebagai suatu akibat, sejauh mana arah dan tujuan kebijakan yang telah diterapkan benar-benar tercapai. Sebagai proses implementasi merupakan rangkaian keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat atau efek. Maka ciri utama dari proses adalah kinerja yang tepat dan memuaskan, sebagai hasil implementasi berkaitan dengan tingkat seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu memuaskan.

2.2.Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

2.2.1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Program pemerintah yang dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasional, non operasionalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. (buku panduan Bos 2011;2). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2008 tentang pendanan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, seperti; pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.

2.2.2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara Khusus program Dana Bos bertujuan untuk :

- 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD, SMP Negeri dan Swasta yang sederajat terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah Bertaraf Nasional (SBN). Sumbangan atau pungutan bagi sekolah RSBI dan SBN harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan atau pungutan tidak boleh berlebih.
- 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah Negeri maupun swasta.
- 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta (buku panduan BOS 2011)

2.2.3.Sasaran Program BOS dan Besaran Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD,SDLB dan SMP,SMPLB, termasuk SD-SMP satu atap (satap) dan tempat kegiatan belajar mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik Negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ada pada sekolah tersebut. (Buku Panduan BOS 2011)

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

1. SD/SDLB : Rp. 580.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp. 710.000,-/siswa/tahun

Penyaluran kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah ini dilakukan secara Triwulan (Tiga Bulanan), yaitu periode Januari – Maret, April – Juni, Juli – September dan Oktober – Desember. Penyaluran dilakukan di Bulan pertama setiap Triwulan.

2.2.4.Larangan Penggunaan Dana BOS

1. Disimpan dengan maksud dibungakan
2. Dipinjamkan kepada pihak lain
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru atau siswa untuk kepentingan pribadi (bukan investaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima SSM.
7. Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat.
8. Membangun gedung atau ruangan baru.
9. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh.
12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitanya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar Nasional dan upacara keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosoalisasi, pendampingan terkait program BOS, Perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.3.Pandangan Syariat Agama Islam Tentang Kebijakan

Al-Quran terkadang menjelaskan berbagai berita tentang kondisi pemerintahan Islam di kota Madinah mulai dari pokok masalah hingga kendala-kendalanya. Kitab suci ini juga menjelaskan metode dan mekanisme keluar dari masalah-masalah tersebut. Berita-berita itu tidak hanya menganalisa dan mengklasifikasi masalah, tapi juga menyinggung

mekanisme penanganan dan kebijakan Rasul Saw. Karena Rasul Saw mengetahui kondisi politik, sosial, dan bahkan budaya masyarakat, maka beliau tidak hanya sekedar memberikan usulan dan masukan, tapi juga mengeluarkan instruksi untuk dilaksanakan.

Dalam pemikiran al-Quran, pemerintah dengan sendirinya tidak memiliki nilai intrinsik, tapi kekuasaan harus ditujukan untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan dan mengatur masyarakat. Mengimplementasikan dengan mantap keputusan, program dan kebijakan serta tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan undang-undang. Allah Swt berfirman,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْتُلْكُمُ الْكُفْرُ وَالْكَافِرُونَ ۚ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْتُلْكُمُ الْكُفْرُ وَالْكَافِرُونَ ۚ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْتُلْكُمُ الْكُفْرُ وَالْكَافِرُونَ ۚ﴾
 Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Ali 'Imran: 159).

Maksudnya urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Dari penjelasan ayat diatas apabila mempunyai suatu keinginan atau membulatkan tekad, maka bertawakkallah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” ketakwaan dalam segala bidang,

serta kecenderungan emosional. Allah Swt berfirman, “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

Bila kita akan melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kata Arab karena ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata pendidikan yang umumnya kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah*”, dengan kata kerja “*rabba*”. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah “*ta’lim*” dengan kata kerjanya “*allama*”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya “*Tarbiyah wa Ta’lim*”, sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah Islamiyah*”.

Kata kerja *rabba* (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Dalam ayat Al-Qur’an kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut:



“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil”. (QS. Al-Isra’ [17] : 24).

Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah usaha dimana peserta didik diharapkan bisa menyelesaikan persolan-persolan dalam kehidupannya. Tentu

dengan harapan agar peserta dapat menjadi lebih baik dan bisa mengembangkan potensi dirinya dan bermanfaat untuk lingkungan. Dalam Al-Qur'an dengan jelas Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Al Mujaadilah [58] : 11)

Dengan Ilmu segala persoalan dan problema yang dihadapi manusia akan dengan mudah dapat terselesaikan persoalan-persoalan yang rumit yang membuat manusia menderita dengan ilmu dapat teratasi pada kontek inilah Allah SWT menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad SAW;

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.”(Al-Alaq [96] ; 1)

Secara tersirat ayat ini memerintahkan manusia untuk selalu belajar dan belajar. Posisinya sebagai wahyu yang diturunkan pertama kali seakan ingin menegaskan bahwa sebelum bertindak dan melangkah kemanapun yang harus dilakukan oleh umat manusia adalah belajar. Dengan kata lain adalah hal

terpenting yang harus dimiliki manusia sebelum hal-hal lain, karena dengan ilmu manusia akan lebih bermanfaat bagi lingkungan dan sesamanya. Dan oleh karena itulah manusia pada akhirnya akan lebih tinggi derajatnya. Seperti telah dijanjikan Allah SWT dalam ayat diatas, begitu pentingnya suatu ilmu dalam Agama Islam.

Dalam konteks ini pulalah Negara sebagai Institusi yang mempunyai tanggungjawab untuk mengayomi masyarakatnya dan menciptakan usaha-usaha agar bagaimana seluruh elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat mengenyam pendidikan dengan harapan pendidikan tersebut dapat mengantarkan Negara ini menjadi negeri yang maju dan sajahtera hal ini dapat dilihat pada undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Sedangkan menurut istilah Pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya *insan-insan kamil* setelah proses pendidikan berakhir.

Pada hakikatnya pendidikan agama Islam adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolak ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah maka kehidupan beragama dan pendidikan

agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan.

Pembangunan Nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani antar bidang material dan spritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.

2.4 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989;31)

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari variabel yang diteliti. untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah;

1. Kebijakan adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat/publik.
2. Implementasi Kebijakan adalah suatu rangkaian program atau kegiatan yang dibuat untuk melaksanakan semua keputusan yang sudah diambil

atau ditetapkan dengan menggunakan berbagai sumber daya dalam suatu pola yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program kompensasi subsidi bahan bakar minyak dalam bidang pendidikan yang tujuan utamanya adalah meringankan dan membebaskan biaya iuran/operasional sekolah bagi para siswa kurang mampu dan siswa lainnya agar mereka tetap dapat menikmati pelayanan pendidikan serta penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011. Untuk mengukur Implementasi Kebijakan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menggunakan indikator sebagai berikut;

- A. Tertib Administrasidalam penelitian ini adalahtingkat kepatuhan pengelolaan dana BOS yang telah ditetapkan dalam peraturan penggunaan dana BOS. Seperti
 - a) Merencanakan Anggaran Sekolah
 - b) Mengimplementasikan dana BOS

- c) Pengelolaan dana BOS
 - d) Pelaporan Dana BOS.
- B. Transparan dalam penelitian ini adalah adanya keterbukaan tentang pengelolaan keuangan dana BOS yang mudah diakses oleh masyarakat. seperti;
- a) Penyediaan informasi yang jelas tentang dana BOS
 - b) Kemudahan akses informasi yang didapat oleh masyarakat/ Wali murid
- C. Akuntabel dalam penelitian ini adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaksana dana Bos yang diterapkan oleh pemerintah, seperti
- a) Kejelasan sasaran dari penggunaan dana BOS
 - b) Kelayakan dan konsisten target dari dana BOS
 - c) Akurasi dan kelengkapan informasi penggunaan dana BOS
 - d) Penyebarluasan info mengenai informasi dana BOS

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif, Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang Ilmiah.

1.2. Waktu dan Tempat

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dari Bulan oktober, dan november, desember tahun 2012. Lebih kurang selama empat (4) Bulan. Tempat penelitian ini dilakukan pada SMP Negeri Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih kecamatan Tampan sebagai tempat penelitian karena lokasi Kecamatan Tampan yang dekat untuk melakukan penelitian oleh penulis dan masih kurangnya transparansi dalam penggunaan Dana BOS di SMPN Kecamatan Tampan.

1.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan penulis, lalu diolah oleh penulis. Atas pertanyaan yang diberikan kepada Responden.

b. Data Skunder

Yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh Peneliti. Yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

1.4. Populasi dan Sampel

1.4.1. Populasi

Menurut Sugiono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan, karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun populasi pada penelitian ini adalah wali Murid pada SMPNegeri Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Karena kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk membebaskan pungutan seluruh siswa, dari pungutan dalam bentuk apapun serta meringankan beban biaya operasi sekolah,serta mengikutsertakan Wali Murid dalam penyusunan Dana BOS di Sekolah. Dari kebijakan Dana BOS yang dilakukan Pemerintah yang menjadi sasaran atas Pelaksanaa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikelola oleh pihak sekolah adalah Wali Murid/masyarakat dan sekolah SMP Negeri Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru secara langsung. Di Kecamatan Tampan terdapat dua buah SMP Negeri yaitu SMPN 20 terdapat jumlah muridnya 1034 siswa dan SMPN 23 muridnya 919 siswa. Dari Dua Buah SMP Negeri Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru maka jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah 1953 Wali Murid berdasarkan sumber data dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2012.

1.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu. Peneliti akan berhadapan dengan populasi yang bersifat homogen dan jumlah cukup besar. Sampel diasumsikan homogen karena tidak ada aturan yang menentukan jumlah alokasi Dana BOS, penentuan alokasi Dana BOS dengan ketentuan Jumlah murid per sekolah dan setiap sekolah memiliki perilaku yang sama dalam penerimaan dan pemanfaatan dari Dana BOS untuk biaya operasi sekolah serta tidak melakukan pungutan kepada Wali murid. Sampel merupakan bagian populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang dijadikan responden dalam suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah Sampling Insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. (Sugiyono, 2005 : 96). Siapa saja Wali Murid secara kebetulan bertemu dengan peneliti di SMPN kecamatan Tampan saat menyempit anaknya di sekolah.

Mengingat keterbatasan waktu dan biaya penulis, yang cukup besar dalam mengambil data, penulis dapat menentukan sampel dengan menggunakan teori Slovin dan jumlah sampel diketahui:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \longrightarrow \text{Tekhnik Slovin}$$

Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

e² : Tingkat kesalahan 10%

Adapun populasi dari tabel diatas dapat dilihat sebesar 1953 Murid. Adapun jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{N}{n} = \frac{1}{1 + Ne^2}$$

$$\frac{n}{1 + 1953(10\%)^2}$$

$$\frac{n}{1 + 1953 (0,01)}$$

$$\frac{n}{1 + 19,53}$$

$$n = 1953 \frac{1}{20,53}$$

$n = 95,13 = 100$ Wali Murid SMP yang menjadi sampel (digenapkan jumlahnya).

Untuk memperkuat penelitian penulis menambahkan informan dengan Purposive Sampling. Mustafa (2000:46), Purposive Sampling adalah, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara sekolah dan salah satu dari komite sekolah.

Karena informan ini yang mengetahui permasalahan serta yang melaksanakan penggunaan Dana BOS disekolah. Komite sekolah pada setiap sekolah terdapat dari empat sampai enam orang komite berdasarkan utusan dari wali murid yang dipilih oleh wali murid yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan yang lainnya sebagai anggota komite, jadi yang penulis butuhkan untuk dijadikan informan hanya satu orang saja dari komite karena sudah bisa mewakili data atau informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini disebabkan fungsi dari setiap komite itu sama.

Adapun jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tabel III.1
Penentuan Jumlah Populasi dan Sample

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel
1	Kepala Sekolah SMPN 20 Pekanbaru	1	1
2	Kepala Sekolah SMPN 23 Pekanbaru	1	1
3	Komite SMPN 20 Pekanbaru	5	1
4	Komite SMPN 23 Pekanbaru	4	1
5	Bendahara Sekolah SMPN 20 Pekanbaru	1	1
6	Bendahara Sekolah SMPN 23 Pekanbaru	1	1
7	Wali Murid SMPN 20 Pekanbaru	1034	50
8	Wali Murid SMPN 23 Pekanbaru	919	40
Jumlah		1966	96

Sumber Data Olahan 2012

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
- b. Angket yaitu upaya yang dilakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan berserta alternatif jawabanya kemudian disebarkan kepada responden
- c. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden

1.6. Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu proses analisis data yang dilakukan dengan menelaah data secara keseluruhan dari berbagai sumber. Berbagai data yang ada kemudian diklasifikasikan dan dibandingkan variabel-variabelnya. Setelah itu dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Analisis deskriptif ini senantiasa dapat menguraikan pemecahan berbagai permasalahan dalam bentuk penalaran kalimat-kalimat yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Setelah seluruh data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil dari penelitian dan kemudian dituangkan kedalam table-tabel dengan angka dan persentase dan selanjutnya menganalisa secara mendeskripsikan dengan menggunakan **Rumus Statistik**.

Menurut Arikunto Suhasimi (2006:79), dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuesioner diberi skor :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Sesuai /Baik/Selalu/Baik | = 76-100% |
| b. Cukup Sesuai/Sering/Cukup Baik | = 56-75% |
| c. Kurang Sesuai/Kadang-Kadang/Kurang Baik | = 40-55% |
| d. Tidak Sesuai/Tidak Pernah/Tidak Baik | = Kurang dari 40% |

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai Lading, lambat laut menjadi perkampungan. kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian di sebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.

Nama payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya dikampung bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar mesjid raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatip untuk membuat pekan di senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh Putranya Raja muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 21 Rajab 1204 H atau Tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, lima puluh, tanah datar dan Kampar), Negri Senapelan diganti nama nya menjadi

“*Pekan Baharu*” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulia saat itu senapelan sudah ditingalkan dan mulia populer sebutan “*Pekan Baharu*”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*Pekanbaru*”.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan Besluit Van Her Inlanche Zelf bestuur Van Siak No.1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut *district*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer di sebut *gokung*, distri menjadi gun di pekepalai oleh *gunco*.
4. Ketetapan Gubernur di Sumatra di Medan Tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang di sebut *haminte* atau kota baru.
5. Undang-undang No.22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, kota Pekanbaru di beri status Kota Kecil.
6. Undang-undang No.8 tahun 1956 menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. Undang-undang No.1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi kota praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. Undang-undang No.18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebagai Kotamadya.
10. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan kotamadya berubah majadi kota.

a. Letak dan luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ bujur timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1987 Tanggal 7 September peraturan pemerintah no 19 tahun 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $+ 446,50 \text{ Km}^2$ terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan perda kota Pekanbaru NO.4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

b. Batasan wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota ;

1. Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah selatan : Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan

3. Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

4. Sebelah barat : Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungan antara lain : Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ – $43,5^{\circ}\text{C}$ dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. Kelembapan maksimum antara 96% - 100% Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

e. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai ibukota provinsi lainnya sebagai berikut:

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km

Tembilahan	= 21,3,5 Km
Kerinci	= 33,3 Km
Siak	= 74,4
Bangkinang	= 51 Km
Pasir pengarian	= 132,5 Km
Bengkalis	= 128,5 Km
Bagan	= 192,5
Dumai	= 125 Km

f. Visi misi

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah “terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”.

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

1. Pusat perdagangan dan jasa, menggambarkan keadaan masyarakat kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan pemerintah kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya di names akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapt mewujudkan kota Pekanbaru menajdi pusat perdagangan dan jasa di kawasan sumatera.
2. Pusat pendidikan, pemetinatah kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha unutk memberdayakan masyakatnya agar dapt berperan serta

secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di kota pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

3. Pusat kebudayaan melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya melayu. Kehendak menjadikan kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan melayu antara lain akan arahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat melayu serta makin mantapnya kehidupan dapat yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.
4. Masyarakat sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relative aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.

5. Berladaskan iman dan taqwa merupakan landasa spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan prilaku individu pembinaan agama bersama-sama tercermin dalam kehidupan yang harmoni, seimbang dan selaras.

Kota Pekanbaru yang dikanal dengan slogan “KOTAKU, kotamu dan kota kita BERTUAH”, mempunyai motto : BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN, dan HARMONIS dan arti :

g. Bersih

Bersih lahir, jiwa, rumah tangga lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan.

h. Tertib

Tertibe pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, peribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku.

i. Usaha Bersama

Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, parpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cendekiawan seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

j. Aman

Rasa tenang setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan.

k. Harmonis

Serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggunagan, saling hormat menghormati.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Sehingga pada saat ini luas wilayah Kecamatan Tampan adalah \pm 65 KM2 yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah lain sangat cocok dipergunakan untuk pertanian.

4.1.1 Administrasi Pemerintahan

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Wilayah Kecamatan sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan pelayanan 4 Kelurahan, 43 RW dan 210 RT.

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan telah dibuka loket pelayanan di Kantor Kecamatan. Pada loket pelayanan tersebut secara transparan ditetapkan proses, mekanisme, waktu, tarif dan dasar hukum pemberian pelayanan.

Jumlah aparat pemerintahan di Kecamatan Tampan adalah 50 orang, 22 orang diantaranya berada di sekretariat Kecamatan.

4.1.2 Mata Pencarian Penduduk di Wilayah Kecamatan Tampan

Mata pencarian penduduk di wilayah Kecamatan Tampan pada umumnya adalah wiraswasta/pedagang, pegawai negeri, buruh, dan pengrajin/industri kecil.

Tabel IV.1
Mata Pencarian Kecamatan Tampan Pada Umumnya.

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (orang)
1.	Pengusaha sedang/besar	134
2.	Pengrajin/ industri kecil	939
3.	Buruh Industri	1.274
4.	Buruh Bangunan	1.683
5.	Pedagang	2.473
6.	PNS	2.731
7.	TNI/POLRI	673

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Tampan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih rinci bahwa mata pencarian setiap individu dan kelompok pada umumnya mereka adalah sebagai pedagang yaitu 2.473 orang.

4.1.3 Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum

a. Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan menurut tingkatan pendidikan di Kecamatan Tampan:

Tabel IV.2.
Tingkat Pendidikan

No	KELURAHAN	TINGKATAN PENDIDIKAN					
		TK	SD	SLTP	SLTA	AKADEMIK	PT
1.	Simpang Baru	4	4	1	1	-	2
2.	Tuah Karya	4	5	3	1	1	-
3.	Sidomulyo Barat	4	3	2	1	1	-
4.	Delima	4	4	1	-	-	-
	Jumlah	16	16	7		2	2

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Tampan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di kecamatan Tampan sudah mewakili dari tingkat terendah sampai ke perguruan tinggi.

b. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Wilayah Kecamatan Tampan pada mayoritasnya adalah muslim dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3
Sarana Ibadah Kecamatan Tampan

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	68
2.	Mushallah	47
3.	Gereja	5
	Jumlah	120

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Tampan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang paling banyak adalah masjid yaitu sebanyak 68 bangunan, karena kecamatan Tampan pada mayoritasnya adalah masyarakat muslim.

c. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Wilayah Kecamatan Tampan pada tabel berikut :

Tabel IV.4
Sarana Kesehatan.

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	1
2.	Puskesmas dan Puskemas Pembantu	4
3.	Balai Pengobatan	8
	Jumlah	13

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Tampan

Dari tabel diatas dapat diperjelas bahwa sarana kesehatan merupakan sangat penting pada setiap wilayah. Maka sebanyak 13 sarana kesehatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan masyarakat untuk wilayah kecamatan.

4.2 Organisasi Pelaksana Program BOS

Organisasi pelaksana program BOS dipisah antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Di tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten/kota terdapat Tim Manajemen BOS dan Tim Manajemen Bos pada masing-masing sekolah. Untuk organisasi Pelaksana BOS Kota Pekanbaru sebagai berikut :

A. Tim Pengarah

- a) Bupati/Walikota
- b) Ketua Bappeda Kabupaten/Kota

B. Tim Manajemen BOS

- 1. Tim Dinas Pendidikan Kota Penanggungjawab
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tim Pelaksana
 - b. Manajer
 - c. Seksi Pendataan
 - d. Seksi BOS dan BOS Buku SD
 - e. Seksi BOS dan BOS Buku SMP
 - f. Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah
 - g. Seksi Publikasi/Humas

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Kab/Kota

- a. Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah/madrasah/ponpes
Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah /madrasah/ponpes penerima BOS. Melakukan pendataan sekolah/madrasah/ponpes.
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah /madrasah /ponpes dalam rangka penyaluran dana.
- c. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- d. Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim Manajemen BOS Provinsi.
- e. Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah ponpes dan lembaga penyalur.
- f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- g. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota.
- h. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dan instansi terkait.

C. Tim Manajemen BOS Sekolah

1. Penanggung Jawab
 - a. Kepala Sekolah
2. Anggota
 - a. Bendahara Sekolah
 - b. Komite Sekolah yang terdiri dari Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Orang Tua Siswa Siswa

3. Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS Sekolah
 - a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah
 - c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada
 - e. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan
 - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
 - g. Mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman
 - h. Membuat laporan triwulan penggunaan Dana BOS dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - i. Melakukan pembukuan secara tertib
 - j. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
 - k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan
 - l. Bagi sekolah Negeri wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari Dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota

- m. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan RAPBS.
- 4. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Sekolah
 - a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan
 - b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada wali murid setiap semester bersamaan dengan pertemuan wali murid dan sekolah pada saat penerimaan raport
 - c. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS maupun dari sumber lain
 - d. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengencer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan.

4.3 Mekanisme dan Pelaksanaan BOS

4.3.1 Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, selanjutnya menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
- b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah tim BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap-tiap provinsi yang telah dituangkan dalam DIPA Provinsi.

- c. Tim Manajemen BOS Provinsi dan tim manajemen BOS Kab/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
- d. Tim Manajemen BOS Kab/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui surat keputusan penetapan sekolah umum yang menerima BOS yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Dewan Pendidikan.
- e. Tim Manajemen BOS kota/kabupaten mengirim surat keputusan alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke-tim manajemen BOS provinsi dengan tembusan lembaga Bank atau Kantor Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

4.3.2 Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Adapun persyaratan penyaluran dana BOS adalah :

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi).
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten\Kota
- c. Tim manajemen BOS kabupaten\kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah selanjutnya dikirim kepada tim manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah\manajemen\ponpes yang menolak BOS.
- d. Penyaluran dana BOS :
 - 1) Penyaluran dana untuk periode bulan Januari - Desember dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan :

- Dana BOS disalurkan tiap periode 3 bulan
 - Dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode 3 bulan.
- 2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh tim tingkat Provinsi melalui Bank Pemerintah\Pos dengan tahap – tahap sebagai berikut:
- Tim manajemen BOS Provinsi mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan.
 - Unit terkait pada dinas pendidikan Provinsi\kanwil depag Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPP-LS)
 - Dinas Pendidikan Provinsi\kanwil depag Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi
 - KPPN melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang diterbitkan kepada rekening Kas Negara
 - Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung kerekening penampung tim manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui kantor Bank Pemerintah/Pos yang tunjuk sesuai dengan perjanjian kerja sama antara dinas pendidikan Provinsi/kanwil Depag Provinsi dan Lembaga Penyalur (Bank/Pos). Perjanjian

kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode sebelumnya dapat digunakan/diperpanjang atau diperbaiki apabila perlu. Tim manajemen BOS Provinsi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank penyalur.

- Tim manajemen BOS Kabupaten/kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh kantor Pos/bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh manajemen BOS kabupaten/kota. jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada kantor Pos/Bank, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.
- Jika dana BOS diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat dari kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi. Secara teknis mekanisme pengembalian dana tersebut diatur oleh manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur
- Jika ada siswa pindah atau mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan maka dana BOS siswa tersebut dalam semester berjalan menjadi hak sekolah atau madrasah yang lama.

- Jika pada tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi akibat dari kelebihan pencairan dana atau pengembalian dari sekolah, selama hak seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi maka dana tersebut harus dikembalikan di kas Negara.
- Bunga bank atau jasa giro akibat adanya dana rekening penampungan manajemen BOS Provinsi harus disetor ke - Kas Negara.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : V.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – laki	30	33
2	Perempuan	60	67
Jumlah		90	100 %

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden perempuan adalah responden terbanyak yang berjumlah 60 orang atau 67%, sedangkan responden laki-laki hanya 30 orang atau 33%. Adapun jumlah responden berdasarkan jenis kelamin mempunyai tingkat umur yang berbeda-beda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-35	8	9
2	36-45	25	28
3	46-55	57	63
Jumlah		90	100 %

Sumber: Data Olahan 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bawah dari 90 responden, mayoritas responden memiliki tingkat umur antara 46 sampai 55 tahun dengan jumlah responden sebanyak 57 orang atau 63% responden. Selanjutnya di susul dengan responden yang memiliki tingkat umur antara 36 sampai 45 Tahun dengan jumlah sebanyak 25 orang atau 28% dari keseluruhan responden. Sedangkan yang paling sedikit yaitu tingkat umur dari 25 sampai 35 tahun yaitu berjumlah 8 orang atau 9% dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.3

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMP	12	13
2	SMA/SMK	50	55
3	Sarjana (S1)	25	27
4	Pasca Sarjana (S2)	3	3
Jumlah		90	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA / SMK dengan jumlah 50 orang atau 55% dari keseluruhan jumlah responden. Selanjutnya disusul oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang berjumlah 25 orang atau 27% responden. Selanjutnya disusul oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP yang berjumlah 12 orang atau 13% Dan yang paling sedikit adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) yang berjumlah 3 orang tau sekitar 3% dari total keseluruhan responden.

5.2 Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan)

Kebijakan Dana BOS merupakan Program dari Pemerintah Pusat untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan telah merelokasikan sebagian besar anggaran yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari kenaikan bahan bakar minyak. Ada 4 (Empat) sektor alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak antara lain ;

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bantuan Infrastruktur Pedesaan
4. Subsidi Langsung Tunai (SLT)

Untuk Bidang Pendidikan Pemerintah membuat suatu kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah untuk dikelola oleh pihak sekolah sesuai dengan ketentuan. Besaran Dana BOS untuk tiap sekolah SMP Negeri ditentukan berdasarkan jumlah murid.

Untuk mendapatkan Dana BOS dari Pemerintah Pusat Sekolah harus mengisi formulir Dana BOS dan membuat Rancangan Anggaran Penyusunan Biaya Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh Sekolah dan Komite Sekolah. RAPBS sebagai persyaratan untuk menerima Dana BOS yang harus mendapatkan persetujuan dari wali murid dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komite Sekolah. Selanjutnya pihak sekolah mengajukan RAPBS tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Pekanbaru akan mengirim ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk selanjutnya diajukan ke Pemerintah Pusat.

5.2.1 Hasil Tinjauan Lapangan / Observasi

Salah satu kebijakan Pemerintah yang dirancang melalui Kebijakan BOS Pemerintah memberikan Dana ke Sekolah – Sekolah antara lain SMP Negeri yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Dana BOS. Kebijakan Dana BOS ini tidak diberikan langsung kepada siswa tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah Dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada di masing – masing sekolah. Sehingga Dana BOS yang diterima tiap sekolah SMP Negeri Pekanbaru Khususnya SMP Negeri Kecamatan Tampan tidak sama atau bervariasi. Adapun ketentuan besaran Dana BOS untuk tingkat SMP sebesar Rp. 710.000./Per-Siswa/tahun.

Dana BOS yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah tanpa intervensi dari pihak lain dengan demikian kebijakan Dana BOS sangat mendukung Implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (Otonomi). Pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah.

Komite Sekolah berasal dari Orang Tua Siswa pada SMP Negeri, Komite sekolah dipilih oleh Orang Tua siswa untuk mewakili seluruh Wali

Murid Sekolah. Komite Sekolah terdiri dari Ketua Komite, Sekretaris dan 4 (Empat) orang sebagai anggota Komite Sekolah.

Kebijakan dari Dana BOS ini untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Sekolah, dengan adanya kebijakan Dana BOS dari Pemerintah Pusat diharapkan Sekolah dapat lebih mengembangkan sekolah. Dalam melakukan Implementasi Kebijakan Dana BOS di Sekolah Pihak Sekolah dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah
2. Tidak melakukan pungutan kepada Wali Murid. Serta membebaskan seluruh biaya sekolah kepada siswa
3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan dan mengelola Dana BOS secara lebih Profesional, Tertib Administrasi, Transparan, Mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2 Tanggapan Responden

Adapun Indikator untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMPN Kota Pekanbaru (Study Kasus SMPN Kecamatan Tampan) adalah sebagai berikut :

1. Tertib Administrasi

Tertib Administrasi dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan yang harus dilaksanakan

oleh pihak sekolah dalam mengelola Dana BOS secara tertib administrasi, mulai dari perencanaan anggaran Dana BOS yang akan digunakan sekolah untuk pembiayaan rencana kegiatan sekolah yang diadakan bersama Wali murid, mengimplementasikan Dana BOS tersebut di Sekolah berjalanya penggunaan Dana BOS dengan lancar yang harus dirasakan oleh siswa tanpa hambatan, pengelolaan Dana BOS yang dilakukan sekolah sesuai dengan ketentuan samapai dengan Pelaporan Dana BOS yang harus dilakukan oleh Pihak sekolah kepada wali murid maupun kepada pihak yang wajib untuk memintak pelaporan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah, dalam mengelola Dana BOS secara Tertib Administrasi yang harus dilakukan oleh sekolah. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang tertib administrasi yang dilakukan oleh Pihak Sekolah yang Merencanakan Anggaran yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi, kegiatan sekolah dalam membuat rencana anggaran penyusunan biaya sekolah (RAPBS) yang melibatkan Orang Tua dari Siswa yang terdiri dari Komite sekolah serta adanya gambaran tujuan penggunaan Dana BOS dan Pihak Sekolah melakukan pelaporan penggunaan Dana BOS Kepada Wali Murid setiap penerimaan Raport Siswa. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap merencanakan anggaran yang dilakukan oleh Pihak Sekolah, Komite Sekolah serta Wali Murid dapat kita lihat pada table berikut ini ;

Tabel V.4
Tanggapan Responden Terhadap Rencana Anggaran Sekolah
/ Membuat RAPBS Untuk Penggunaan Dana BOS Pihak Sekolah
Melakukan Musawarah Terhadap Wali Murid

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	70	77,78
2	Cukup Setuju	20	22,22
3	Kurang Setuju	-	0
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa bahwa dari 90 responden mayoritas responden mengatakan setuju dengan jumlah 70 responden atau 77,78%, mengatakan bahwa sekolah dalam Rencana Anggaran Penyusunan Biaya Sekolah (RAPBS) mengadakan musawarah dengan Komite Sekolah dan mengikut sertakan wali murid terlebih dahulu, selanjutnya diikuti oleh 20 responden atau 22,22% responden mengatakan cukup setuju. Berarti dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah melakukan musawarah dalam membuat RAPBS.

Dari hasil wawancara peneulis dengan Bapak Hendria sebagai anggota Komite sekolah pada tanggal 19 Desember 2012 mengatakah. *“Bahwa sekolah dalam membuat RAPBS, sebelum penggunaan Dana BOS pihak sekolah membagikan undangan kepada wali murid untuk hadir dalam rapat dalam pembahasan penggunaan Dana BOS yang akan dikelola oleh sekolah pada satu smester.”*

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai penyusunan anggaran Dana BOS dengan adanya tujuan yang jelas untuk penggunaan dana BOS di sekolah

Tabel V.5
Tanggapan Responden Penyusunan Anggaran Dana BOS
Adanya Tujuan Yang Jelas Untuk Penggunaan Dana BOS

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	30	33,33
2	Cukup Setuju	60	66,66
3	Kurang Setuju	-	0
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas terlihat mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 60 responden atau 66,66% dari keseluruhan responden bahwa penyusunan Anggaran dana BOS mempunyai tujuan yang jelas dalam penggunaan dana BOS di sekolah, selanjutnya responden mengatakan setuju dengan jumlah 30 orang atau 33,33%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana BOS sudah adanya tujuan untuk penggunaan Dana BOS di sekolah SMP Negeri.

Dari hasil wawancara penulis dengan bendahara sekolah SMPN 20 dengan ibu Yenni pada tanggal 19 Desember 2012 mengatakan. *“Dalam penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh semua sekolah harus mempunyai tujuan dan sasaran agar Dana BOS tersebut jelas kemana digunakan oleh pihak sekolah supaya tercapainya tujuan dari penggunaan Dana BOS yang telah ditentukan kemana aja Dana BOS ini boleh digunakan.”*

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai adanya kesepakatan antara Kepala sekolah, Komite Sekolah dan wali murid untuk pengelolaan dana BOS di Sekolah sebagai berikut;

Tabel V.6
Tanggapan Responden Adanya Kesepakatan Antara
Kepala Sekolah, Komite Sekolah Dan Wali Murid Untuk
Pengelolaan Dana BOS Di Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	30	33,33
2	Cukup Setuju	58	64,44
3	Kurang Setuju	2	2,22
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 58 orang atau 64,44% bahwa sekolah melakukan kesepakatan dengan komite sekolah maupun dengan wali murid dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, selanjutnya responden mengatakan setuju dengan jumlah 30 orang atau 33,33% dan sisinya 2 orang atau 2,22% responden mengatakan kurang setuju. Meskipun dilihat dari jawaban responden tersebut bervariasi. Namun dapat disimpulkan ternyata pihak sekolah sudah melakukan kesepakatan dengan Komite Sekolah serta Wali murid dalam pengelolaan dan BOS di sekolah. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS yang menikutsertakan wali murid dalam rapat dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.7
Tanggapan Responden terhadap perencanaan
dan Pelaporan Penggunaan Dana BOS Oleh Sekolah
Dan Mengikutsertakan Wali Murid Dalam Rapat

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	60	66,66
2	Cukup Setuju	30	33,33
3	Kurang Setuju	-	0
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 90 wali murid yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan setuju dengan jumlah 60 orang atau 66,66%, menyatakan bahwa pihak sekolah melakukan pelaporan dana BOS kepada wali murid setiap pengambilan raport siswa, selanjutnya dengan jumlah 30 responden atau 33,33% mengatakan cukup setuju. Dari jawaban responden tersebut bahwa pihak sekolah selalu mengikutsertakan wali murid dalam rapat untuk perencanaan dan juga laporan penggunaan dana BOS di sekolah.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah SMPN 20 dan SMPN 23 pada tanggal 19 dan 21 desember mengatakan.

“Dalam penyusunan RAPBS sekolah mengadakan rapat terlebih dahulu dengan wali murid dalam penggunaan Dana BOS dan nantinya sekolah akan melaporkan atas Dana BOS yang telah digunakan sekolah kemana aja penggunaan Dana BOS ini, karena dalam penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah wali murid mempunyai hak untuk ikut merencanakan dan mengusulkan untuk penggunaan Dana BOS dengan ketentuan yang dibolehkan oleh pemerintah untuk apa aja Dana BOS ini boleh digunakan.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Dana BOS di sekolah SMP Negeri dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.8
Tanggapan Responden Penggunaan Dana BOS Oleh Pihak Sekolah Sesuai Dengan Petunjuk Teknis BOS

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	63	70
2	Cukup Setuju	27	30
3	Kurang Setuju	-	0
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukan dari 90 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan setuju dengan jumlah 63 responden atau 70% menyatakan bahwa pihak sekolah sudah sesuai dengan petunjuk Teknis BOS dari pemerintah dalam pelaksanaan Dana BOS di sekolah, selanjutnya dengan jumlah 27 responden atau 30% menyatakan cukup setuju dari keseluruhan responden yang menjawab. Dari jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah dalam melakukan Implementasi Dana BOS di sekolah sesuai dengan buku petunjuk pedoman Dana BOS. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden dalam penggunaan Dana BOS oleh sekolah sesuai dengan hasil rapat antara pihak sekolah, komite sekolah dan Wali Murid dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.9
Tanggapan Responden Penggunaan Dana BOS Oleh
Sekolah Sesuai Dengan Hasil Rapat Antara Pihak
Sekolah, Komite Sekolah Dan Wali Murid

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	28	31,11
2	Cukup Setuju	58	64,44
3	Kurang Setuju	4	4,44
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan dari 90 responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 58 responden atau 64,44% menyatakan bahwa pihak sekolah dalam penggunaan Dana BOS sesuai dengan hasil rapat dengan komite sekolah dan wali murid, selanjutnya dengan jumlah 28 responden atau 31,11% menyatakan setuju dan sisanya 4 atau 4,44% responden mengatakan kurang setuju. Dari jawaban responde tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah dalam penggunaan Dana BOS sekolah berdasarkan hasil rapat yang dilakukan dengan komite sekolah serta wali murid. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden untuk tidak melakukan pungutan kepada wali murid karena adanya dana BOS di sekolah dan seluruh biaya operasional sekolah terpenuhi dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.10
Tanggapan Responden Terhadap Dibebaskannya Semua
Biaya Operasional dan Seluruh Biaya Operasional
Sekolah Terpenuhi Oleh Dana BOS

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	47	52,22
2	Cukup Setuju	40	44,44
3	Kurang Setuju	3	3,33
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan, bahwa dari 90 responden yang menyatakan setuju dengan jumlah 47 responden atau 52,22% menyatakan bahwa sekolah tidak melakukan pungutan biaya sekolah kepada wali murid serta dengan adanya Dana BOS di sekolah sudah dapat memenuhi biaya operasional sekolah, selanjutnya yang menyatakan cukup setuju dengan jumlah 40 responden atau 44,44% dan sisanya 3 responden atau 3,33% mengatakan kurang setuju. Dari jawaban responden yang bervariasi ini dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah tidak lagi melakukan pungutan biaya sekolah kepada wali murid dengan adanya Dana BOS di sekolah serta semua biaya operasional sekolah dapat terpenuhi.

Dari hasil wawancara penulis dengan bendahara SMPN 20 dan SMPN23 pada tanggal 19 dan 21 mengatakan. *“Bahwa pelaksanaan Dana BOS yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh sekolah dan ternyata dapat meringankan biaya operasional sekolah hanya saat ini belum dapat menjangkau secara optimal dari besaran Dana BOS yang diterima sekolah sebesar Rp. 710.000 per/siswa.”*

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang penulis lihat sekolah masih ada meminta biaya kepada wali murid dengan sebutan sumbangan. Dari peraturan penggunaan Dana BOS menyatakan sekolah yang mendapatkan Dana BOS tidak boleh melakukan pungutan, tetapi dibolehkan untuk memintak sumbangan kepada wali murid tanpa ada patokan dan paksaan yang sifatnya sukarela, namun penulis lihat sekolah menentukan besar sumbangan yang harus dibayar oleh wali murid.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang tertib administrasi untuk pengelolaan dana BOS, serta adanya keaktifan pengawasan dari wali murid terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.11
Tanggapan Responden Terhadap Berperan Aktifnya
Pengawasan Dari Wali Murid Pengelolaan Dana BOS Di Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	29	32,22
2	Cukup Setuju	57	63,33
3	Kurang Setuju	4	4,44
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukan, bahwa dari 90 responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 57 responden atau 63,33% menyatakan bahwa wali murid berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah, selanjutnya dengan jumlah 29 responden atau 32,22% menyatakan setuju dan sisanya 4 responden atau 4,44%

menyatakan kurang setuju. Dari jawaban yang diberikan responden dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wali murid sudah berperan aktif dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana BOS di sekolah.

Dari hasil observasi penulis dilapangan melihat wali murid masih tidak mau peduli terhadap bantuan Dana BOS yang dilakukan pemerintah kepada sekolah serta dikelola oleh sekolah secara mandiri. Masih kurang keaktifan dan keikutsertaan wali murid terhadap dana BOS yang digunakan oleh sekolah.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden dalam pemahaman wali murid terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Dana BOS di Sekolah dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.12
Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Orang Tua Siswa
Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana BOS Di Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	2	2,22
2	Cukup Setuju	19	21,11
3	Kurang Setuju	60	66,66
4	Tidak Setuju	9	10
Jumlah		90	100%

Sumber Data :Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan, bahwa dari 90 responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan kurang setuju dengan jumlah 60 responden atau 66,66% menyatakan bahwa kurangnya pemahaman wali murid terhadap pemanfaatan Dana BOS di sekolah, selanjutnya dengan jumlah 19 responden atau 21,11% menyatakan cukup setuju terhadap pemahaman wali murid dalam pemanfaatan

Dana BOS di sekolah, selanjutnya responden yang mengatakan tidak setuju dengan jumlah 9 responden atau 10% dan sisanya 2 responden atau 2,22% menyatakan setuju. Meskipun dilihat dari jawaban responden bervariasi dalam memberikan jawaban akan tetapi dapat disimpulkan ternyata masih kurangnya pemahaman wali murid terhadap pemanfaatan Dana BOS di sekolah ini dapat dilihat dari jawaban responden yang mengatakan kurang setuju. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden adanya laporan penggunaan Dana BOS yang disampaikan oleh sekolah kepada wali murid setiap penerimaan raport siswa dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.13
Tanggapan Responden Terhadap Penyampaian Laporan Penggunaan Dana BOS Yang Dilakukan Pihak Sekolah Kepada Wali Murid

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	27	30
2	Cukup Setuju	55	61,11
3	Kurang Setuju	8	8,89
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olaham 2012

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 55 responden atau 61,11% menyatakan bahwa pihak sekolah senantiasa menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada wali murid setiap penerimaan raport siswa, selanjutnya dengan jumlah 27 responden atau 30% menyatakan setuju dan sisanya 8 responden atau 8,89% menyatakan kurang setuju. Dari jawaban yang diberikan

responden dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah senantiasa menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada wali murid setiap penerimaan raport siswa. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap keaktifan wali murid untuk ikutserta dalam penyampaian laporan penggunaan Dana BOS dapat dilihat sebagai berikut ini;

Tabel V.14
Tanggapan Responden Dalam Keaktifan Wali Murid
Untuk Menghadiri Laporan Penggunaan Dana BOS Di Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	22	24,44
2	Cukup Setuju	57	63,33
3	Kurang Setuju	11	12,22
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 57 responden atau 63,33% menyatakan bahwa wali murid aktif dalam mengikuti laporan penggunaan Dana BOS yang disampaikan oleh pihak sekolah, selanjutnya dengan jumlah 22 responden atau 24.44% menyatakan setuju dan sisanya 11 responden atau 12,22% menyatakan kurang setuju. Dari jawaban yang diberikan responden dapat disimpulkan bahwa wali murid telah aktif mengikuti laporan penggunaan Dana BOS yang disampaikan oleh pihak sekolah dalam penggunaan Dana BOS kepada wali murid. Untuk melihat Rekapitulasi tanggapan responden dari pernyataan indikator Tertib Administrasi Penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh SMP Negeri dapat kita lihat pada tabel berikut ini;

Tabel V.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator
Tertib Administrasi Penggunaan Dana BOS

Item Pernyataan	Kategori Jawaban									
	Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		N	%
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Menyusun RAPBS sekolah mengadakan rapat dengan wali murid	70	77,78	20	22,22	-	0	-	0	90	100
Penyusunan anggaran dana BOS adanya tujuan	30	33,33	60	66,66	-	0	-	0	90	100
Penggunaan dana BOS dimulai dengan adanya kesepakatan	30	33,33	58	64,44	2	2,22	-	0	90	100
Perencanaan sampai dengan pelaporan Dana BOS melibatkan orang tua	60	66,66	30	33,33	-	0	-	0	90	100
Penggunaan Dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis	63	70	27	30	-	0	-	0	90	100
Penggunaan dana BOS sesuai dengan rencana kesepakatan	28	31,11	58	64,44	4	4,44	-	0	90	100
Karena ada dana BOS semua siswa dibebaskan dari pungutan	47	52,22	40	44,44	3	3,33	-	0	90	100
Wali murid berperan aktif melakukan pengawasan	29	32,22	57	63,33	4	4,44	-	0	90	100
Orang tua siswa mengetahui dan memahami dana BOS	2	2,22	19	21,11	60	66,66	9	10	90	100
Dalam penerimaan rapor pihak sekola menyampaikan	27	30	55	61,11	8	8,89	-	0	90	100

laporan dana BOS kepada wali murid										
Wali aktif Murid dalam penyampaian laporan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah	22	24,44	57	63,33	11	12,22	-	0	90	100
JUMLAH	408	41,21	481	48,59	92	9,29	9	0,90	990	100

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Tertib Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan), maka dapat disimpulkan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan **cukup setuju** dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan sebanyak 481 atau 48,59% responden menyatakan bahwa implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah secara Tertib Administrasi dilaksanakan oleh sekolah, ini terlihat dari seluruh pernyataan dari indikator Tertib Administrasi yang penulis ajukan kepada responden menjawab cukup setuju, selanjutnya dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan **setuju** sebanyak 408 atau 41,21% responden menyatakan implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan sekolah secara Tertib Administrasi sudah dilaksanakan oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan **kurang setuju** sebanyak 92 atau 9,29% responden menyatakan

implementasi Dana BOS yang dilakukan sekolah secara Tertib Administrasi yang dilakukan oleh sekolah dan sisanya 9 atau 0,90% responden menjawab pernyataan **tidak setuju**.

Disesuaikan dengan hasil wawancara penulis terhadap Tertib Administrasi yang dilakukan oleh SMP Negeri Pekanbaru khususnya kecamatan Tampan. Dimana hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 23 pada tanggal 19 dan 21 desember yang menjadi responden dalam penelitian ini memberikan tanggapan.

“Bahwa sekolah dalam merencanakan anggaran penyusunan biaya sekolah (RAPBS) selalu mengadakan rapat bersama komite sekolah dan mengundang wali murid untuk dapat berpartisipasi dalam menyusun anggaran penggunaan Dana BOS di sekolah. Serta dalam penerimaan raport siswa diwajibkan kepada wali murid untuk dapat mengambil raport siswa dan sebelum pengambilan raport maka akan dilaporkan atau menyapaikan penggunaan Dana BOS kepada wali murid untuk penggunaan dan pengelolaan dana BOS di sekolah pada setiap semester”.

Namun dari hasil kajian lapangan / observasi yang dilakukan peneliti serta informasi yang peneliti dapatkan dilapangan menyebutkan betapa besarnya dominan kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun pengelolaan Dana BOS hal ini terjadi hampir pada seluruh SMP Negeri Kota Pekanbaru khususnya SMP Negeri Kecamatan Tampan dimana guru dan wali murid hampir tidak pernah diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun oleh pihak sekolah. Hal yang demikian inilah menjadikan fungsi dan kontrol belum dapat berjalan secara efektif.

Dari data angket yang penulis ajukan kepada responden, dimana mayoritas responden mengatakan **cukup setuju** dengan implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah secara Tertib Administrasi, penulis menilai dikarenakan wali murid yang menjadi responden dalam penelitian ini masih kurang memahami peraturan dan penggunaan Dana BOS, ini dapat penulis lihat ketika penulis berada dilapangan dimana responden masih bingung untuk mengisi angket yang penulis ajukan.

2. Transparan

Transparan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BOS yang harus dilakukan oleh sekolah secara transparan /terbuka supaya wali murid serta masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami penggunaan dan pemanfaatan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah serta dapat menghindari kesalahpahaman dari wali murid dalam penggunaan dana BOS oleh sekolah juga dapat terhindar dari penyelewengan penggunaan Dana BOS di sekolah. Oleh karena itu pihak sekolah harus menyediakan informasi dan kemudahan akses informasi kepad wali murid maupun kepada masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang penyediaan informasi di sekolah dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.16
Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya Informasi
Penggunaan Dana BOS Yang Lengkap Bagi Wali Murid

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	10	11,11
2	Cukup Setuju	77	85,55
3	Kurang Setuju	3	3,33
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 77 responden atau 85,55% menyatakan bahwa sekolah sudah menyediakan informasi penggunaan Dana BOS di lingkungan sekolah, selanjutnya dengan jumlah 10 responden atau 11,11% menyatakan setuju dan sisanya 3 responden atau 3,33% menyatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan oleh responden dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah ada menyediakan informasi penggunaan Dana BOS di sekitar lingkungan sekolah untuk diketahui oleh wali murid maupun masyarakat.

Dari hasil observasi penulis dilapangan melihat bahwa sekolah telah menyediakan informasi penggunaan Dana BOS seperti spanduk dan baliho tetapi belum optimal sekolah dalam menyediakan informasi penggunaan Dana BOS kepada wali murid maupun masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kemudahan informasi yang didapatkan wali murid dalam penggunaan Dana BOS di sekolah dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.17
Tanggapan Responden Terhadap mudahnya Wali Murid
Mengetahui Dan Mendapatkan Informasi Penggunaan Dana BOS

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	13	14,44
2	Cukup Setuju	67	74,44
3	Kurang Setuju	10	4,12
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukan dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 67 responden atau 74,44% menyatakan bahwa wali murid dengan mudahnya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah 13 responden atau 14,44% menyatakan setuju dan sisanya 10 responden atau 4,12% menyatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden, artinya wali murid telah dapat dengan mudah serta informasi penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah secara langsung.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang orang tua siswa mengatakan. *“Bahwa sekolah memang pada tahun ini telah memberikan kemudahan informasi kepada orang tua siswa terhadap Dana BOS yang digunakan oleh sekolah walaupun masih belum sempurna atau belum secara keseluruhan.”*

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap sekolah yang menyediakan papan informasi/iklan di lingkungan sekolah dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.18
Tanggapan Responden Terhadap Sekolah Yang
Menyediakan Papan Informasi/Iklan

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase
1	Setuju	37	41,11
2	Cukup Setuju	50	55,56
3	Kurang Setuju	3	3,33
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 50 responden atau 55,56% menyatakan bahwa sekolah menyediakan papan iklan/informasi penggunaan Dana BOS dilingkungan sekolah, selanjutnya dengan jumlah 40 responden atau 41,11% menyatakan setuju dan sisanya 3 responden atau 3,33% menyatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden dari tabel diatas bahwa sekolah sudah menyediakan papan iklan/informasi yang berupa sepanduk maupun melalui mading dilingkungan sekolah. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang memberikan kemudahan akses informasi penggunaan dana BOS yang dikelola oleh sekolah dapat diketahui oleh wali murid secara umum penggunaan Dana BOS dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.19
Tanggapan Responden Terhadap Mengetahui Pengelolaan
Dana BOS Oleh Wali Murid Secara Umum Di Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	4	4,44
2	Cukup Setuju	68	75,56
3	Kurang Setuju	18	20
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukan dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 68 responden atau 75,56% menyatakan bahwa wali murid dapat mengetahui secara umum penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah 18 responden atau 20% menyatakan kurang setuju dan sisanya 4 responden atau 4,44% menyatakan setuju. Dari kategori jawaban yang bervariasi diberikan oleh responden akan tetapi dapat disimpulkan bahwa wali murid sudah dapat mengetahui secara umum penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah.

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua komite sekolah SMPN 20 dengan Bapak Said mengatakan.

“Sekolah senantiasa memberitahukan penggunaan Dana BOS dan wali murid mempunyai hak untuk mengetahui secara umum penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, dalam peraturan Dana BOS pun sudah dijelaskan maka itu diwakili oleh Komite sekolah, tapi tidak mungkin komite sekolah aja yang aktif karena semua wali murid mempunyai hak yang sama terhadap penggunaan dana BOS oleh sekolah. Namun sangat disayangkan masih lemahnya keingintahuan wali murid terhadap Dana BOS ini.”

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap sekolah memberikan kemudahan akses informasi kepada wali murid dalam penggunaan Dana BOS dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.20
Tanggapan Responden Terhadap Sekolah Memberikan
Kemudahan Akses Informasi Kepada Wali Murid Untuk
Penggunaan Dana BOS Di Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	12	13,33
2	Cukup Setuju	72	80
3	Kurang Setuju	6	6,67
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 72 responden atau 80% menyatakan bahwa sekolah memberikan kemudahan akses informasi penggunaan dana BOS kepada wali murid, selanjutnya dengan jumlah 12 responden atau 13,33% menyatakan setuju dan sisanya 6 responden atau 6,67% menyatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah memberikan kemudahan akses informasi penggunaan Dana BOS kepada wali murid.

Dari hasil observasi penulis dilapangan melihat bahwa sekolah sudah menyediakan akses informasi penggunaan Dana BOS oleh sekolah kepada wali murid namun penulis menilai masih belum optimal dalam menyediakan akses informasi kepada wali murid maupun masyarakat. Karena saat penulis berada dilapangan kesulitan untuk

mengetahui penggunaan dana BOS dimana saling melemparkan bahkan penulis dioper-oper seperti bola.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pihak sekolah senantiasa memberikan dan mengumumkan informasi Dana BOS kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan Dana BOS dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.21
Tanggapan Responden Terhadap Pihak Sekolah Mengumumkan
Penggunaan Dana BOS Kepada Masyarakat

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	23	25,56
2	Cukup Setuju	65	72,22
3	Kurang Setuju	2	2,22
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 65 responden atau 72,22% menyatakan bahwa pihak sekolah senantiasa memberikan dan mengumumkan penggunaan dana BOS bagi masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan Dana BOS di sekolah, selanjutnya dengan jumlah 23 responden atau 25,56% menyatakan setuju dan sisanya 2 responden atau 2,22% menyatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden bervariasi akan tetapi dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah secara senantiasa memberikan serta mengumumkan penggunaan Dana BOS bagi masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan dan pengelolaan Dana BOS di sekolah. Untuk

melihat Rekapitulasi tanggapan responden dari indikator Transparan dalam penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah dapat kita lihat pada tabel berikut ini;

Tabel V.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator
Transparan Penggunaan Dana BOS

Item Pernyataan	Kategori Jawaban									
	Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		N	%
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Tersedianya informasi penggunaan Dana BOS bagi wali murid	10	11,11	77	85,55	3	3,33	-	0	90	100
Wali murid dapat mengetahui dan info Dana BOS yang dikelola oleh sekolah	13	14,44	67	74,44	10	11,12	-	0	90	100
Sekolah menyediakan papan iklan dan spanduk penggunaan Dana BOS di sekolah	37	41,11	50	55,55	3	3,33	-	0	90	100
Dana BOS dikelola oleh sekolah dapat untuk diketahui oleh wali murid secara umum	4	4,44	68	75,56	18	20	-	0	90	100
Sekolah memberikan kemudahan informasi kepada wali murid	12	13,33	72	80	6	6,67	-	0	90	100
Pihak sekolah senantiasa mengumumkan penggunaan Dana BOS kepada wali murid	23	25,56	65	72,22	2	2,22	-	0	90	100
JUMLAH	99	18,33	399	73,89	42	7,78	-	0	540	100

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Transparan dalam penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan), maka dapat disimpulkan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan **cukup setuju** dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan sebanyak 399 atau 73,84% responden menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan Dana BOS, sudah dilakukan oleh sekolah secara Transparan. Berarti sekolah dalam melakukan implementasi kebijakan Dana BOS sekolah sudah menjalankan Transparan atau keterbukaan penggunaan Dana BOS disekolah ini terlihat dari seluruh pernyataan dari indikator Taransparan yang penulis ajukan kepada responden menjawab cukup setuju transparan yang dilakukan oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan **setuju** sebanyak 99 atau 18,33% responden menyatakan setuju implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan sekolah secara Transparan dilakukan oleh sekolah dan sisanya 42 atau 7,78% responden menjawab pernyataan **kurang setuju** menyatakan implementasi Dana BOS yang dilakukan sekolah secara Transparan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Komite Sekolah dengan Bapak Said Masri pada tanggal 19 desember tentang Transparan penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah menyatakan.

“Dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah sudah dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen sesuai dengan buku panduan BOS. Pada tahun ini sekolah sudah melakukan pelaksanaan Dana BOS dengan Transparan/keterbukaan kepada wali murid maupun masyarakat untuk mengetahui penggunaan Dana BOS disekolah bisa dikatakan baik dari pada tahun sebelumnya, walaupun transparan yang dilakukan sekolah masih terdapat kelemahan dan kekurangan”.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan/observasi dari penulis bahwa transparan penggunaan dan pengelolaan Dana BOS. Melihat bahwa sekolah sudah menjalankan penggunaan Dana BOS secara transparan, seperti peneliti lihat di lapangan, sekolah sudah menyediakan informasi penggunaan Dana BOS baik berupa spanduk maupun melalui mading sekolah yang disediakan oleh sekolah kepada wali murid maupun untuk masyarakat dan kemudahan akses pusat informasi. Namun transparan yang dilakukan oleh sekolah belum optimal dimana peneliti melihat serta mendapatkan informasi ternyata masih banyaknya wali murid yang belum mengetahui berapa besaran jumlah Dana BOS yang diterima per/siswa tersebut dan diperkuat lagi dengan tidak ditemukannya di semua penyediaan informasi yang dibuat oleh sekolah tidak adanya ditemukan berapa besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah yang berdasarkan jumlahnya per/murid di masing-masing sekolah.

Dari data angket yang penulis lakukan dimana mayoritas responden mengatakan **cukup setuju** dengan implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah secara Transparan, penulis menilai dikarenakan wali murid yang menjadi responden dalam penelitian ini masih kurangnya partisipasi atau keigintahuan wali murid terhadap Dana BOS yang dikelola oleh sekolah secara langsung, ini dapat penulis lihat ketika penulis berada dilapangan dimana responden masih tidak peduli terhadap Dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah.

3. Akuntabilitas

Merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah agar dapat melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Dengan adanya akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah akan adanya kelayakan dan konsisten target dari penggunaan Dana BOS serta adanya kejelasan sasaran dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BOS yang adanya akurasi dan kelengkapan informasi dalam pelaksanaan Dana BOS oleh sekolah. Dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BOS untuk bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah kepada pemerintah maupun masyarakat sekolah harus adanya melakukan penyebaran informasi penggunaan Dana BOS kepada wali murid maupun masyarakat supaya penggunaan dan pengelolaan Dana BOS terhidar dari penyelewengan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kelayakan dan konsisten target penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.23
Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Dana
BOS Sesuai Dengan Target Yang Telah Ditentukan

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	35	38,89
2	Cukup Setuju	52	57,78
3	Kurang Setuju	3	3,33
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 52 responden atau 57,78% menyatakan bahwa penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan target yang telah ditentukan, selanjutnya dengan jumlah 35 responden atau 38,89% menyatakan setuju dan sisanya 3 responden atau 3,33% menyatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden berarti sekolah dalam penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai penggunaan Dana BOS di sekolah. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap adanya sasaran penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel V.24
Tanggapan Responden Terhadap Sudah Adanya Sasaran
Penggunaan Dana BOS Dijalankan Oleh Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	34	37,78
2	Cukup Setuju	53	58,89
3	Kurang Setuju	3	3,33
4	Tidak setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responde yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 53 responden atau 58,89% menyatakan bahwa sekolah adanya sasaran untuk penggunaan dana BOS dalam pelaksanaan Dana BOS, selanjutnya dengan jumlah 34 responden atau 37,78% mengatakan setuju dan sisanya 3 responden atau 3,33% mengatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang dijawab oleh responden dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah mempunyai sasaran dalam melaksanakan penggunaan dana BOS di sekolah. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kelengkapan administrasi penggunaan Dana BOS di sekolah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V.25
Tanggapan Responden Terhadap Kelengkapan
Administrasi Penggunaan Dana BOS Oleh Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	63	70
2	Cukup Setuju	27	30
3	Kurang Setuju	-	0
4	Tidak Setuju	-	0
Junlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengataka setuju dengan jumlah 63 responden atau 79% menyatakan bahwa sekolah memiliki kelengkapan administarsi dalam penggunaan Dana BOS, selanjutnya dengan jumlah 27 responden atau 30% mengatakan cukup setuju sekolah memiliki kelengkapan administrasi penggunaan Dana BOS. Dari kategori jawaban yang diberikan oleh responden berarti sekolah telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk penggunaan Dana BOS. Hal ini diperkuat dari hasil observasi atau tinjauan dilapangan peneliti, setelah bendahara sekolah melihatkan semua kelengkapan administrasi untuk penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah kepada penulis. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap penilaian yang dilakukan oleh wali murid dalam penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel V.26
Tanggapan Responden Terhadap Penilaian Yang Dilakukan
Orang Tua Untuk Penggunaan dan Pelaksanaa Dana
BOS Yang dikelola Oleh Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	6	6,67
2	Cukup Setuju	34	37,78
3	Kurang Setuju	50	55,55
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan

kurang setuju dengan jumlah 50 responden atau 55,55% menyatakan bahwa masih kurangnya wali murid melakukan penilaian dalam penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah 34 responden atau 37,78% mengatakan cukup setuju wali murid melakukan penilaian untuk penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah dan sisanya 6 responden atau 6,67% mengatakan setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan oleh responden dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya penilaian yang dilakukan oleh wali murid dalam penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kejelasan sasaran Dana BOS untuk penggunaan dana BOS di sekolah sudah mempunyai ukuran yang menjadi sasaran penggunaan Dana BOS oleh sekolah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V.27
Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Dana
BOS Mempunyai Sasaran Yang Menjadi Ukuran Untuk
Penggunaan Dana BOS

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	78	86,67
2	Cukup Setuju	12	13,33
3	Kurang Setuju	-	0
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan setuju dengan jumlah 78 responden atau 86,67% menyatakan bahwa sekolah mempunyai ukuran untuk menjadi sasaran

dalam penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah 12 responden atau 13,33% menyatakan cukup setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan oleh responden, berarti sekolah mempunyai ukuran yang menjadi sasaran dalam penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap akurasi dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh sekolah kepada wali murid untuk penggunaan Dana BOS dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V. 28
Tanggapan Responden Terhadap Dana BOS Yang Dikelola
Sekolah Berjalan Sesuai Rencana dan Tersedianya
Informasi Kepada Wali Murid

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	23	25,56
2	Cukup Setuju	65	72,22
3	Kurang Setuju	2	2,22
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 65 responden atau 72,22% menyatakan bahwa sekolah dalam mengelola Dana BOS dapat berjalan sesuai dengan rencana sasaran serta sekolah menyediakan informasi kepada wali murid, selanjutnya dengan jumlah 23 responden atau 25,56% mengatakan setuju dan sisanya 2 responden atau 2,22% menyatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden bervariasi, namun dapat disimpulkan dalam penggunaan

Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah sudah berjalan dengan rencana penggunaan Dana BOS serta sekolah juga sudah menyediakan informasi penggunaan Dana BOS kepada wali murid. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pembukuan yang harus dibuat oleh sekolah terkait penggunaan Dana BOS dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V.29
Tanggapan Responden Terhadap Pembukuan Penggunaan
Dana BOS Oleh Pihak Sekolah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	66	73,33
2	Cukup Setuju	24	26,67
3	Kurang Setuju	-	0
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan setuju dengan jumlah 66 responden atau 73,33% menyatakan bahwa sekolah telah membuat pembukuan terkait penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah 24 responden atau 26,67% mengatakan cukup setuju pihak sekolah telah membuat pembukuan terkait penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Dari kategori jawaban yang diberikan responden, berarti sekolah membuat pembukuan khususnya penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap penyebaran informasi yang dilakukan oleh sekolah seperti dokumentasi penggunaan Dana BOS yang tersedia

dilingkungan sekolah maupun melalui sumber lainnya yang dilakukan oleh sekolah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V.30
Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya
Dokumentasi Penggunaan Dana BOS Dilingkungan
Sekolah / Melalui Sumber Lainnya

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	23	25,56
2	Cukup Setuju	65	72,22
3	Kurang Setuju	2	2,22
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 65 responden atau 72,22% menyatakan dalam setiap penggunaan Dana BOS sekolah membuat dokumentasi serta memasang dokumentasi tersebut dilingkungan sekolah untuk diketahui oleh wali murid maupu pertanggungjawaban dari sekolah dalam pelaksanaan Dana BOS, selanjutnya dengan jumlah 23 responden atau 25,56% menyatakan setuju. Dan sisanya 2 responden atau 2,22% mengatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah membuat dokumentasi dalam pelaksanaan Dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada wali murid. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap penggunaan Dana BOS yang dilakukan sekolah adanya melakukan menyebarluaskan dari penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V.31
Tanggapan Responden Terhadap Menyebarluaskan Penggunaan
Dana BOS Melalui Mading Atau Melalui Media Lainnya

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Setuju	18	20
2	Cukup Setuju	65	72,22
3	Kurang Setuju	7	7,78
4	Tidak Setuju	-	0
Jumlah		90	100%

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan cukup setuju dengan jumlah 65 responden atau 72,22% menyatakan bahwa dalam penggunaan Dana BOS pihak sekolah telah melakukan menyebarluaskan dari penggunaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah 18 responden atau 20% mengatakan setuju dan sisanya 7 responden atau 7,78% mengatakan kurang setuju. Dari kategori jawaban yang diberikan responden bervariasi, namun dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah dalam pelaksanaan penggunaan Dana BOS adanya melakukan penyebarluasan informasi penggunaan Dana BOS baik melalui mading sekolah, spanduk maupun media sumber lainnya yang dibuat oleh pihak sekolah. Untuk melihat Rekapitulasi tanggapan responden dari indikator Akuntabilitas pengguna Dana BOS oleh sekolah dapat kita lihat pada tabel berikut ini;

Tabel V.32
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator
Akuntabilita Penggunaan Dana BOS

Item Pernyataan	Kategori Jawaban									
	Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		N	%
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Penggunaan Dana BOS sesuai dengan target yang ditentukan	35	38,89	52	57,78	3	3,33	-	0	90	100
Penggunaan Dana BOS sesuai dengan sasaran dijalankan oleh sekolah	34	37,78	53	58,89	3	3,33	-	0	90	100
Penggunaan Dana BOS, sekolah memiliki semua administrasi	63	70	27	30	-	0	-	0	90	100
Adanya wali murid melakukan penilaian penggunaan yang dilakukan oleh sekolah	6	6,67	34	37,78	50	55,55	-	0	90	100
Penggunaan Dana BOS mempunyai sasaran yang menjadi ukuran dalam penggunaan Dana BOS oleh sekolah	78	86,67	12	13,33	-	0	-	0	90	100
Dana BOS yang dikelola oleh sekolah berjalan dengan	23	25,56	65	72,22	2	2,22	-	0	90	100

rencana, adanya tersedia informasi										
Sekolah membuat pembukuaan penggunaan Dana BOS	66	73,33	24	26,67	-	0	-	0	90	100
Dokumentasi atas penggunaan Dana BOS tersedia lengkap dilingkungan sekolah	23	25,56	65	72,22	2	2,22	-	0	90	100
Sekolah menyebarkan penggunaan Dana BOS	18	20	65	72,22	7	7,78	-	0	90	100
JUMLAH	346	42,71	397	49,02	67	8,27	-	0	810	100

Sumber Data : Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pernyataan positif yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Akuntabilitas dalam Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan), maka dapat disimpulkan bahwa dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden mengatakan **cukup setuju** dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan sebanyak 397 atau 49,02% responden menyatakan bahwa implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah secara Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh sekolah ini terlihat dari seluruh pernyataan dari

indikator Akuntabilitas yang penulis ajukan kepada responden menjawab cukup setuju akuntabilitas yang dilaksanakan oleh sekolah, selanjutnya dengan jumlah responden yang menjawab pernyataan **setuju** sebanyak 346 atau 42,71% responden menyatakan implementasi kebijakan Dana BOS yang dilakukan sekolah secara Akuntabilitas dilaksanakan sekolah dan sisanya 67 atau 8,27% responden yang menjawab pernyataan **kurang setuju** menyatakan implementasi Dana BOS yang dilakukan sekolah secara Akuntabilitas masih kurang dilakukan oleh sekolah.

Dari hasil tinjauan lapangan/observasi yang penulis lakukan melihat bahwa sekolah telah membuat bentuk laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Dana BOS yang telah dilaksanakan oleh sekolah, namun saat penulis ingin mengetahui dan melihat laporan pertanggungjawaban Dana BOS, kemana saja penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah penulis tidak dapat melihat buku laporan pertanggungjawaban tersebut, dimana pihak sekolah memberikan berbagai alasan kepada penulis. Berarti penulis dapat menilai bahwa akuntabilitas untuk menyebarkan penggunaan Dana BOS yang dilakukan sekolah belum secara optimal karena masih adanya rasa ketakutan atau rahasia dari sekolah dalam penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOS oleh sekolah.

Dari data-data tersebut penulis mengangap bahwa Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus

SMP Negeri Kecamatan Tampan) untuk akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah di kategorikan cukup baik, karena semua pernyataan positif yang penulis ajukan kepada responden untuk menjawab angket penelitian, mayoritas responden menjawab cukup setuju, artinya Implementasi Dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah telah melakukan akuntabilitas/pertanggungjawaban penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOS kepada wali murid maupun kepada pihak yang wajib untuk memintak pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOS oleh sekolah.

Untuk melihat hasil jawaban responden pada penelitian ini secara keseluruhan dari indikator Implementasi Kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah secara Tertib Administrasi, Transparan dan Akuntabilitas. Berikut ini penulis sajikan tabel rekapitulasi Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan) sebagai berikut;

Tabel 5.33
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi
Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru
(Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan)

(Study Kasus SMK Negeri Kecamatan Tampian)											
No	Indikator	Alternatif Jawaban								N	%
		Baik		Cukup baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
		F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Tertib Administrasi	408	41,21	481	48,59	92	9,29	9	0,90	990	100
2	Transparan	99	18,33	399	73,84	42	7,78	-	0	540	100
3	Akuntabilitas	346	42,71	397	49,02	67	8,27	-	0	810	100
Jumlah		853	36,45	1277	54,58	201	8,59	9	0,38	2340	100 100

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Selanjutnya untuk mengukur Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan), maka dilakukan proses tabulasi data sebagai berikut:

Dari rekapitulasi di atas dapat diketahui sebagai berikut:

Frekuensi option

$$A = 853$$

$$B = 1277$$

$$C = 201$$

$$D = 9$$

Untuk mencari presentase rata-rata di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Rekapitulasi di atas dapat diketahui

$$N = Fa + Fb + Fc + Fd$$

$$= 853 + 1277 + 201 + 9$$

$$= 2340$$

Selanjutnya adalah mencari F dengan terlebih dahulu dengan memberikan bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu:

Option A dengan bobot 4

Option B dengan bobot 3

Option C dengan bobot 2

Option D dengan bobot 1

Dari bobot yang telah diberi nilai di atas maka diperoleh F sebagai berikut:

$$\text{Frekuensi option A} = 853 \times 4 = 3412$$

$$\text{Frekuensi option B} = 1277 \times 3 = 3831$$

$$\text{Frekuensi option C} = 201 \times 2 = 402$$

$$\text{Frekuensi option D} = 9 \times 1 = 9$$

$$\text{Jumlah F} = 7654$$

Berdasarkan dari angka yang telah diperoleh dapat dicari presentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut:

$$P = \frac{F \times 100}{N} : 4$$

$$N$$

$$= \frac{100 \cdot F}{4 \cdot N}$$

$$4 \cdot N$$

$$= \frac{100 (F)}{4 (N)}$$

$$4 (N)$$

$$= \frac{100 \cdot 7654}{4 \cdot 2340}$$

$$4 \cdot 2340$$

$$= \frac{765400}{9360}$$

$$9360$$

$$= 81,77$$

Dari presentase rata-rata kualitatif yang diperoleh diatas adalah presentase Implementasi kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan), untuk memahami baik atau tidaknya implementasi Kebijakan Dana BOS tersebut maka akan diberi ukuran, menurut Suharsimi Ari Kunto sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| a. Sesuai /Baik/Selalu/Baik | = 76-100% |
| b. Cukup Sesuai/Sering/Cukup Baik | = 56-75% |
| c. Kurang Sesuai/Kadang-Kadang/Kurang Baik | = 40-55% |
| d. Tidak Sesuai/Tidak Pernah/Tidak Baik | = 0- 39% |

Berdasarkan hasil tabulasi angket penelitian Implementasi Kebijakan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan) menunjukkan bahwa implementasinya kebijakan Dana BOS yang dilakukan oleh SMP Negeri Kecamatan Tampan sudah berjalan dengan **Baik**, hal ini terlihat dari 90 responden yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas responden memberikan jawaban dengan persentase **81,77%** yang dikategorikan **Baik**.

Meskipun hasil penelitian berada pada kategori **Baik** akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu terdapat kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan dan perlu adanya pembenahan agar pelaksanaan Dana BOS Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru Khususnya SMP Negeri Kecamatan Tampan dapat menunjukan kearah yang lebih baik dalam melakukan Implementasi Kebijakan Dana BOS disekolah serta dapat meningkatkan transparan penggunaan Dana BOS dan menambah peran dari wali murid dalam pelaksanaan Dana BOS disekolah serta dapat bekerjasama dalam meningkatkan pendidikan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mendapatkan berbagai informasi, dimana dari informasi dan data-data tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan. Dari data dan informasi yang penulis dapatkan, baik melalui penyebaran angket kepada responden, wawancara dengan responden. Peneliti dapat menilai dan mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri Kota Pekanbaru (Study Kasus SMP Negeri Kecamatan Tampan) yaitu pada SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 23 Pekanbaru sudah berjalan dengan **Baik**, ini juga sesuai dengan hasil rekapitulasi angket tabulasi penelitian dengan persentase 81,77% dikategorikan **Baik**. Walaupun dari hasil tabulasi angket dan wawancara mengungkapkan baik, namun dari hasil data observasi penulis dan tinjauan lapangan penulis melihat masih adanya terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam mengimplementasikan peraturan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan, penggunaan dan pengelolaan Dana BOS. Seperti masih dominanya pihak sekolah dalam penyusunan RAPBS dan wali murid hanya dijadikan sebagai formalitas saja ini disebabkan karena kurangnya pemahaman wali murid terhadap penggunaan dan pemanfaatan Dana BOS, dan transparansi yang dilaksanakan

oleh sekolah masih belum optimal untuk melakukan transparan/keterbukaan kepada wali murid serta lemahnya pengawasan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh wali murid maupun masyarakat ini disebabkan karena masih lemahnya fungsi komite sekolah sebagai Tim Manajemen BOS di sekolah.

6.2 Saran

1. Berkaitan dengan Tertib Administrasi dalam penyusunan RAPBS, Hendaknya pihak sekolah melibatkan orangtua murid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dengan beberapa alternatif dapat digunakan. Di antaranya, membuat kota saran untuk wali murid dalam perumusan penyusunan RAPBS sehingga adanya pendapat/partisipasi wali murid dalam penyusunan RAPBS yang digunakan oleh sekolah, jadi wali murid tidak sebagai formalitas saja.
2. Sekolah harus mengelola Dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks itu, sebaiknya sekolah memiliki sistem komunikasi dengan orang tua, masyarakat, dan komite sekolah dalam hal program dan pertanggungjawaban keuangan. Jika mungkin, sekolah dapat membuka website, sehingga dapat memudahkan wali murid/masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan sekolah serta dapat meningkatkan pengetahuan wali murid.
3. Fungsi komite sekolah sebagai pengontrol (controlling agency) akan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan serta keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu, komite sekolah bukan lagi sebagai stempel (legalisasi) di tubuh sekolah. Ia memiliki hak

penting untuk terlaksananya pendidikan di institusi sekolah secara bersih dan bebas korupsi.

4. Fokus utamanya tentu advokasi kepada wali murid/masyarakat, baik masyarakat sekolah maupun masyarakat yang secara finansial terkait langsung dengan sekolah. Kita berharap, ada kesadaran dari berbagai pihak untuk ikut mengawal terbebasnya institusi luhur pembangunan moral itu agar bersih dari korupsi. Di sinilah dibutuhkan masyarakat yang kuat, cerdas, dan berani menuntut hak-haknya atas lembaga pendidikan yang tidak memberikan layanan selayaknya. Apalagi, mengindikasikan tanda-tanda korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung; 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta; 1996
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta; 2004.
- Rifai, Muhammad. *Politik Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz media. Jogjakarta; 2011
- Sujianto. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktik*. Alaf Riau, Pekanbaru ; 2008
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta; 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta, Bandung; 2003.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Pustaka setia, Bandung; 2008
- Sunggono, Bambang. *Kebijakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2003
- Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Malang, Rineka Cipta; 1989
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta; 2005
- Yusuf, Anwar Ali. *Studi Pendidikan Agama Islam*. Pustaka Setia, Bandung; 2003
- Buku panduan BOS. *Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Depdiknas, Jakarta; 2007.
- Buku Petunjuk Teknis. *Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*. Kemendikbud, Jakarta; 2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011
- Dedy Achmad Kurniady. *Pengelolaan pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung*. Vol. 12 No 1 2011. Jurnal pendidikan
- Hosiana L. Tobing dkk. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Upaya Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang*. Vol. 5 No 1 2008. Jurnal administrasi publik.
- Lantid Diat Prasajo. *Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Vol. 4 No 2 2010. Jurnal pendidikan